

JURNAL

MASYARAKAT MARITIM

**PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT AKIBAT KONVERSI
MINYAK TANAH KE LPG DIKELURAHAN
TANJUNGPINANG BARAT**

Indratti Sri Suciati, Suryaningsih, Emmy Solina

**PERAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK
(STUDI DESA MANTANG BESAR KABUPATEN BINTAN)**

Arsyad, Subhi, Hidayatun Saliha, Ulpa Sulistiya

**KEDAI KOPI SEBAGAI RUANG PUBLIK:
STUDI TENTANG GAYA HIDUP MASYARAKAT
KOTA TANJUNGPINANG**

Teguh Setiandika Igiasi

**REFORMASI PERATURAN AGRARIA DALAM MENGHADAPI
BONUS DEMOGRAFI**

Rindi Afriandi

**PERJUANGAN KELOMPOK MINORITAS:
STUDI GERAKAN WARIA DI TANAH MELAYU
TANJUNGPINANG**

Marisa Elsera, Sri Wahyunl

**Volume
1**

**Nomor
1**

**Halaman
1-46**

**Tanjungpinang
2017**

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Masyarakat Maritim memuat lima tema yang cukup menarik, dimana pembahasannya mencakup berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh kondisi masyarakat yang dinamis. Salah satunya yaitu mengenai konversi minyak tanah ke LPG. Indratti Sri Suciati berusaha melihat perubahan sosial masyarakat akibat konversi minyak tanah ke LPG di Kota Tanjungpinang sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia yang berujung pada turunnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Arsyad dkk, berusaha menjelaskan persoalan terkait peran orang tua dalam pendidikan di Desa Mantang. Menanamkan nilai tentang pentingnya pendidikan dimana nilai yang dilakukan oleh orang tua yang bekerja yaitu berupa nilai yang ideal khususnya tentang nilai agama, sedangkan untuk nilai aktual dari nilai ideal yang diajarkan berpengaruh kepada perilaku anak.

Perubahan sosial masyarakat di Tanjungpinang ternyata juga terlihat dari hadirnya kedai kopi sebagai ruang publik yang menunjukkan gaya hidup masyarakat. Teguh Setiandika Igiyasi mencoba melihat aktivitas yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Tanjungpinang dimana masyarakat tidak hanya sebatas minum kopi, namun terdapat beragam aktivitas baik itu aktivitas yang serius hingga aktivitas ringan. Beragamnya aktivitas yang dilakukan di kedai kopi telah memberikan kepuasan sehingga masyarakat rela menghabiskan waktunya hanya untuk berada di kedai kopi. Dinamika kehidupan masyarakat tidak hanya pada aspek gaya hidup saja. Rindi Afriandi melihat bahwa kondisi keterbatasan ketersediaan tanah yang dihadapi masyarakat sebagai dampak dari bonus demografi telah menjadi persoalan tersendiri di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu adanya reformasi peraturan agraria dalam menghadapi bonus demografi tersebut.

Selain persoalan terbatasnya ketersediaan tanah, masalah lainnya yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di Tanjungpinang yaitu keberadaan waria (wanita-pria). Keberadaan mereka yang dianggap menyimpang dari nilai dan tentang norma masyarakat Melayu. Marisa Elsera berusaha mengkaji persoalan tersebut secara mendalam mengenai perjuangan kelompok minoritas, khususnya gerakan waria di Tanah Melayu.

Pengelola Jurnal Masyarakat Maritim mengucapkan terima kasih atas partisipasi penulis yang telah menyumbangkan tulisan demi kelancaran terbitnya Jurnal Masyarakat Maritim Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017 Program Studi Sosiologi dan kami akan menunggu tulisan bapak/ibu untuk diterbitkan dalam edisi berikutnya.

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	I
Daftar Isi	III
PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT AKIBAT KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG DI KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT	
Indratti Sri Suciati, Suryaningsih, Emmy Solina	1
PERAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK (STUDI DESA MANTANG BESAR KABUPATEN BINTAN)	
Arsyad, Subhi, Hidayatun Saliha, Ulpa Sulistiyas	7
KEDAI KOPI SEBAGAI RUANG PUBLIK: STUDI TENTANG GAYA HIDUP MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG	
Teguh Setiandika Igjasi	19
REFORMASI PERATURAN AGRARIA DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI	
Rindi Afriandi	29
PERJUANGAN KELOMPOK MINORITAS: STUDI GERAKAN WARIA DI TANAH MELAYU TANJUNGPINANG	
Marisa Elsera, Sri Wahyuni	37

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT AKIBAT KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG DI KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT

Indrati Sri Suciati, Suryaningsih, Emmy solina

Program Studi Sosiologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Social changes are any changes in social institutions within a society, which affect the social system, including the values, attitudes and behavior patterns among groups in society. Pressure on the definition is the basic set of social institutions as human beings, the changes which then affect other social systems. Based on preliminary observations of this LPG conversion program apparently was sudden and unplanned comprehensively. Framework will be operationalized concept refers to the opinion Selo Soemardjan and Bertrand which state that social change affects the social system, where the elements of the social system, namely beliefs, feelings and thoughts, goals, rules / norms, status/ role and facilities. Qualitative research with a qualitative descriptive design format, which aims to describe, to tell a variety of conditions, situations and phenomena of social realities that exist in society. Sampled data were collected through interviews with informants as many as 14 people. From the research results can be concluded that the kerosene to LPG in the Village of West Tanjungpinang has given the change to more efficient public spending among others so survival is more assured, the pattern of behavior among members of the public is more awake, environmental sustainability is maintained by the reduction of air pollution so as to create of a society that is more practical, efficient and effective.

Keywords: *Social Change, LPG.*

Pendahuluan

Perubahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan primernya yang mencakup baik aspek materiil maupun spirituilnya. Kebutuhan-kebutuhan primer tersebut senantiasa berkembang, sehingga harus selalu disesuaikan dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya, baik yang berasal dari lingkungan sosial maupun lingkungan alam.

Salah satu produk olahan minyak bumi yang dekat dengan masyarakat ialah minyak tanah. Mulai dari lampu bakar hingga kompor menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar utamanya, sehingga pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi minyak tanah yang lebih besar dibandingkan LPG. Selain dari

segi ekonomi, ternyata dalam proses distribusi minyak tanah pun sering terjadi penyelewengan-penyelewengan baik oleh distributor maupun konsumen.

Kenaikan minyak dunia yang cenderung tidak stabil juga akan meresahkan masyarakat Indonesia, sehingga kondisi sosial akan menjadi tidak stabil juga. Padahal, dapat kita lihat bahwa konsumsi BBM khususnya minyak tanah sangat besar di Indonesia. Saat harga minyak dunia naik, maka harga minyak tanah yang dijual di masyarakat juga akan naik sehingga warga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli bahan bakar. Secara tidak langsung hal tersebut berakibat pada penurunan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Di Kota Tanjungpinang sendiri, dimana masyarakatnya merupakan masyarakat yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia, diantaranya suku Melayu, Jawa, Batak, China, Minangkabau dan lain-lain. Kemajemukan masyarakat tersebut menyebabkan pengalaman atau pergaulan dengan suku-suku bangsa asing yang datang ke Tanjungpinang mendorong mereka bersikap terbuka, namun tetap berhati-hati. Bagi sebagian orang, sikap hati-hati tersebut sering ditafsirkan secara keliru, sehingga muncul anggapan bahwa orang melayu menolak budaya baru, tertutup, anti perkembangan, anti kemajuan dan tidak mau mengikuti perubahan zaman. Padahal, jika kita mengkaji dan menyimak tunjuk ajar Melayu dengan cermat akan tampak bahwa kebudayaan Melayu sangat mementingkan kemajuan dan ilmu pengetahuan dalam arti luas.

Penggunaan LPG sesungguhnya lebih hemat dibandingkan dengan minyak tanah, sehingga ini merupakan alternatif bahan bakar yang menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat dan bisa mempengaruhi adanya perubahan sosial didalam masyarakat tersebut. Konversi minyak tanah ke LPG di Kota Tanjungpinang diharapkan dapat memberikan perubahan sosial budaya bagi masyarakat di Tanjungpinang, diantaranya lebih efisien waktu, berdaya guna, penurunan tingkat polusi akibat penggunaan minyak tanah, dan penggunaan teknologi yang lebih maju akan berdampak pada modernisasi masyarakat itu sendiri.

Program konversi minyak tanah ke LPG ini dilaksanakan dengan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan

Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 Kg, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/6/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/3/2007 Tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (Tiga) Kg Dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku Beserta Asesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG Untuk Keluarga Miskin Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/2008, Serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61/M-IND/PER/6/2009 tentang Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) Kg Beserta Asesorisnya dan Kompor Gas Satu Tungku untuk Usaha Mikro dalam Rangka Program Konversi Minyak Tanah ke LPG.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah penelitian yang diajukan adalah "Bagaimana perubahan sosial masyarakat akibat konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tanjungpinang Barat menyangkut sikap dan pola perilaku masyarakat, efisiensi waktu serta tujuan yang diharapkan?"

Pembahasan

1. Perubahan sosial masyarakat akibat konversi minyak tanah ke LPG

Dari hasil wawancara dengan para informan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat yakin dan percaya dengan program pemerintah yaitu konversi minyak tanah ke LPG dapat memberikan dampak yang lebih baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini ditandai dengan sudah banyak masyarakat yang mau

memakai kompor LPG dan mereka merasakan ada penghematan sedikit dari pembelian tabung gas dibandingkan jika memakai minyak tanah, meskipun ada sebagian masyarakat yang belum berani memakai kompor gas karena takut terjadi ledakan sehingga mereka menganggap bahwa program pemerintah ini hanya akan menambah masalah baru dimana harga minyak tanah malah semakin mahal.

2. Pengetahuan mengenai konversi minyak tanah ke LPG

Untuk dapat memasukkan masyarakat dalam proses perubahan, maka upaya yang pertama kali perlu dilakukan adalah memahami pemikiran dan tindakan mereka serta membuat mereka percaya kepada pemberi dan pelaku kebijakan. Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan, pengetahuan serta kemauan mereka sehingga kebijakan yang telah dibuat akan dapat diterima oleh masyarakat untuk menuju kearah kehidupan yang lebih baik.

Dari beberapa pernyataan dari para informan melalui wawancara mengenai pengetahuan mereka tentang konversi minyak tanah ke LPG, peneliti menarik kesimpulan bahwa banyak masyarakat yang kurang paham dengan istilah konversi minyak tanah ke LPG, hal itu terjadi karena mayoritas masyarakat di Kelurahan Tanjungpinang Barat tingkat pendidikan SMA dan sebagai ibu rumah tangga. Masyarakat hanya mengetahui bagaimana sebenarnya program pemerintah ini berjalan untuk mewujudkan konversi minyak tanah ke LPG atau pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG melalui pembagian paket tabung LPG.

3. Peran pemerintah setempat terhadap proses penggunaan LPG

Untuk meningkatkan penggunaan tabung yang aman bagi masyarakat, maka pemerintah melalui Pertamina telah melakukan langkah-langkah seperti meningkatkan pengecekan kualitas tabung sesuai SNI juga secara reguler dan pemeriksaan terhadap seluruh material konversi dari saat penerimaan dari pabrikan sampai dengan saat pembagian serta melakukan pengecekan terhadap tabung LPG 3 kg keseluruhan jalur distribusi seperti pada agen. Selain itu juga melakukan inspeksi dan pemberian sanksi pada jalur distribusi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata niaga LPG 3 kg dan tabung serta memberikan asuransi bagi pengguna LPG 3 kg untuk kejadian/kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan material dan aksesoris paket perdana LPG 3 kg, termasuk didalamnya korban kebakaran.

Pada kenyataan di lapangan seperti dikemukakan oleh salah seorang informan yang merupakan ketua RW berinisial UD mengenai peran Pemerintah setempat terhadap proses penggunaan LPG menyatakan bahwa Pemerintah telah memberikan paket tabung LPG 3 kg yang terdiri dari kompor, tabung gas, selang dan regulator ke masyarakat, namun sejauh ini belum ada pemeriksaan yang dilakukan pemerintah setempat mengenai penggunaan LPG dari rumah kerumah.

Seorang informan yang berinisial LW juga menyatakan pendapat yang hampir sama dimana sejauh ini pemerintah melalui kelurahan berperan dalam mendistribusikan paket tabung LPG 3 kg ke masyarakat tanpa ada tindak lanjut untuk bersosialisasi bagaimana prosedur

penggunaan yang benar kepada masyarakat.

Dari beberapa pernyataan dari para informan melalui wawancara mengenai peran pemerintah setempat terhadap proses penggunaan LPG di Kelurahan Tanjungpinang Barat, peneliti menarik kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam konversi minyak tanah ke LPG berupa memberikan paket tabung LPG 3 kg yang terdiri dari kompor, tabung gas, selang dan regulator ke masyarakat, namun sejauh ini belum ada pemeriksaan yang dilakukan pemerintah setempat mengenai prosedur penggunaan LPG ke masyarakat.

Sosialisasi pemerintah ke masyarakat

Adapun langkah-langkah yang diambil pemerintah melalui Pertamina untuk terus memantau kualitas paket konversi dengan tujuan untuk melindungi konsumen antarlain melakukan investigasi pada setiap insiden yang dikaitkan dengan penggunaan material LPG, melakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat meliputi aspek pengenalan material konversi, tata cara penggunaannya, termasuk peningkatan awareness akan aspek keamanan dalam penggunaan LPG, bekerja-sama dengan aparat dan dinas terkait dengan melaksanakan inspeksi terhadap pabrikan material LPG 3 kg, jalur distribusi LPG (termasuk agen) guna mengantisipasi beredarnya material (tabung) illegal serta penempatan sticker instruksi keselamatan pada tabung LPG 3 kg.

Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan yang merupakan ketua RT sekaligus tokoh masyarakat berinisial RB mengenai ada tidaknya sosialisasi ke masyarakat mengenai tata cara penggunaan LPG demi keamanan menyatakan bahwa Pemerintah pernah memberikan sosialisasi setelah

pembagian paket tabung LPG 3 kg di tingkat kecamatan dengan mengundang para ketua RT dan RW. Namun sampai saat ini ketua RT maupun RW beserta pemerintah setempat belum melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat.

Seorang informan yang berinisial SL juga menyatakan pendapat yang hampir sama bahwa sejauh ini pemerintah melalui kelurahan berperan dalam mendistribusikan paket tabung LPG 3 kg ke masyarakat tetapi belum ada sosialisasinya.

Dari beberapa pernyataan dari para informan melalui wawancara mengenai peran pemerintah setempat terhadap proses penggunaan LPG di Kelurahan Tanjungpinang Barat, peneliti menarik kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam konversi minyak tanah ke LPG berupa memberikan paket tabung LPG 3 kg yang terdiri dari kompor, tabung gas, selang dan regulator ke masyarakat, namun sejauh ini belum ada pemeriksaan yang dilakukan pemerintah setempat mengenai prosedur penggunaan LPG ke masyarakat.

Fasilitas

Fasilitas ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dan telah ditentukan terlebih dahulu. Fasilitas disini menyangkut sarana yang mendukung lancarnya penggunaan kompor LPG, seperti regulator yang berstandar Nasional Indonesia (SNI), jenis kompor gas dan sebagainya.

Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan yang merupakan ketua RW berinisial UD mengenai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa paket tabung LPG 3 kg menyatakan bahwa pembagian paket tabung

LPG 3 kg yang dilakukan pemerintah kurang maksimal karena kompor, regulator dan selang yang diberikan cepat rusak dan dianggap kurang aman sehingga banyak masyarakat yang memilih membeli sendiri kompor dan regulator yang lebih aman, meskipun harganya mahal. Hanya tabung 3 kg saja yang masih dipakai.

Penutup

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dilapangan dengan menggunakan indikator yang telah peneliti tentukan, maka dalam penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa program konversi minyak tanah ke LPG di Kelurahan Tanjungpinang Barat telah memberikan perubahan bagi masyarakat antarlain lebih hemat pengeluaran sehingga kelangsungan hidup lebih terjamin, pola perilaku diantara anggota masyarakat lebih terjaga, kelestarian lingkungan tetap terjaga karena berkurangnya polusi udara sehingga dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih praktis, efisien dan efektif. Selain itu ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan kompor LPG, diantaranya dengan adanya peningkatan intensitas komunikasi diantara anggota masyarakat tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik yang tidak diinginkan baik diantara masyarakat maupun anggota keluarga.

Sehubungan dengan banyaknya masyarakat yang masih merasa was-was menggunakan kompor LPG, khususnya di Kelurahan Tanjungpinang Barat serta masih kurangnya partisipasi pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pemeriksaan berkala berkaitan dengan penggunaan kompor gas di masyarakat karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap tata cara

penggunaan LPG sesuai prosedur yang benar, maka penulis mengemukakan saran-saran antara lain :

1. Agar masyarakat mamahami penggunaan kompor gas sesuai prosedur yang benar, maka peran pemerintah sangat diperlukan melalui sosialisai kepada masyarakat langsung sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.
2. Dalam hal keamanan dan kenyamanan penggunaan kompor gas di masyarakat, maka perlu dilakukan pemeriksaan berkala oleh Pertamina terhadap para agen-agen LPG untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan tabung LPG yang bisa membahayakan warga.
3. Masyarakat harus lebih waspada dan memeriksa sendiri keadaan tabung gas setiap saat sebelum digunakan untuk memasak sebagai antisipasi terjadinya kebocoran gas.

Daftar Pustaka

- Suwarsono dan Alvin Y. So, 2006. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali.
- Sztompka, Piotr, 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada.
- Soekanto, Soerjono, 1991. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia
- Giddens, Anthony, 2010. *Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nazir, Muhammad, 2005. *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Idris, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: UII Press.

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Nasikun, 2001. Sistem Sosial Indonesia, Jakarta

: PT. Raja Grafindo Persada.
<http://www.pertamina.com/>, didownload tanggal 8 Maret 2011.
<http://www.haluankepri.com/>,
didownload tanggal 8 Maret 2011.

PERAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK (Studi Desa Mantang Besar Kabupaten Bintan)

Arsyad, Subhi, Hidayatun saliha, Ulpa sulitiyas

Program Studi Sosiologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Untuk melihat masalah ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode studi kasus. Informan penelitian adalah penduduk asli Desa Mantang. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan purposive sampling yaitu menetapkan informan berdasarkan kriteria penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik wawancara mendalam (*deep interview*) dan observasi langsung (*participant as observer*). Analisis data yang digunakan adalah analisis dengan membuat penjelasan yang nantinya bisa memberikan suatu penjelasan yang konkrit dan mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Di Desa Mantang merupakan desa yang masih tradisional dalam segi budaya sebagaimana diketahui bahwa tugas utama orangtua adalah mengurus anak seperti dari segi pendidikan. Seorang ibu dan ayah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, agar anak menjadi pintar, selalu berprestasi disegala bidang baik dilingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menanamkan nilai tentang pentingnya pendidikan, pendidikan merupakan hal yang penting, baik itu pendidikan formal, informal maupun pendidikan non formal dan nilai tersebut telah diajarkan sejak anak masih di usia dini, sehingga sampai anak menginjak usia remaja. Nilai yang dilakukan oleh orangtua yang bekerja yaitu berupa nilai yang ideal khususnya tentang nilai agama karena orang tua menginginkan anak mereka bisa kedepannya menerapkan perilaku terpuji seperti mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai sopan santun, saling harga menghargai, tolong menolong, sedangkan untuk nilai aktual dari nilai ideal yang diajarkan berpengaruh kepada perilaku anak anak walaupun orang tua disibukkan dengan pekerjaan anak anak mampu mendapatkan prestasi di sekolah.

Kata Kunci : Peran Orangtua, Pendidikan.

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil didalam masyarakat yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, yang menyatu didalam sebuah pernikahan. Dalam sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan sebuah gambaran yang ada dalam masyarakat. Menurut Abu Ahmadi, (2008 : 108) Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu atau kelompok yang merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya.

Setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi masing-masing. Didalam keluarga antara ayah dan ibu memiliki peran atau fungsinya masing-masing. Peran seorang ayah dalam keluarga sangat besar peran ayah selain sebagai suami, tetapi juga untuk menafkahi keluarga, ayah juga sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh pada keadaan keluarganya. Sedangkan peran seorang ibu adalah menjadi seorang istri, mengurus rumah tangga serta mendidik anaknya. Maka dari itu ibu memiliki tanggung jawab yang pertama dan utama terhadap anak. Fungsi keluarga adalah merawat, memelihara dan melindungi anak

dalam rangka sosialisasinya agar mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial (Khairuddin, 2008 : 3).

Pendidikan pada anak merupakan bekal bagi anak untuk menghadapi masa depan, oleh karena itu para orang tua harus memperhatikan pendidikan anaknya. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan, terutama bagi kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa. Baik atau buruknya keadaan anak pada waktu dewasa nanti tergantung pendidikan yang ia dapatkan sewaktu masih kecil, terutama pendidikannya disekolah maupun pendidikan yang diberikan oleh orangtua.

Pendidikan dalam hal ini tidak terbatas pada pendidikan apa saja yang diberikan, misalnya mengajarkan kebiasaan baik, sopan santun, pendidikan keagamaan, dan pendidikan disekolah. Semua hal yang terkait didalam rumah tangga dan keluarga seperti perasaan, perilaku dan pergaulan ibu bapak dirumah akan banyak mempengaruhi kondisi baik buruknya seorang anak. Didalam keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi proses pendidikan anak.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan paling utama, karena sebagian besar kehidupan anak di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah didalam keluarga. Menurut Ahmadi, (2007 : 108), dan keluargalah sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anaknya. Ibu dan ayah adalah orang yang pertama dimana anak-anak mengadakan kontak dan yang pertama untuk mengajar pada anak-anak sebagaimana ia hidup dengan orang lain. Sampai anak memasuki sekolah mereka itu

banyak menghabiskan waktu didalam unit keluarga.

Mantang merupakan sebuah Desa yang mayoritasnya masyarakat di Desa Mantang bekerja sebagai nelayan, memiliki keberagaman suku dan terbagi menjadi beberapa desa yakni mantang besar dan kecil, desa mantang juga terdiri dari berbagai RT dan RW memiliki satu kepala desa dilihat dari data latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti peran orang tua terhadap pendidikan anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut oleh karena itu peneliti merumuskan pada penelitian ini sebagai berikut, " Bagaimana Peran Orangtua terhadap pendidikan anak ?"

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Untuk itu dalam meneliti mengenai bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan anak, peneliti harus mendekati beberapa narasumber yang terlibat langsung dalam mendidik anak tersebut. Peneliti tidak mendapatkan kendala dalam wawancara karena peneliti memiliki sedikit pengetahuan dan informasi di Desa Mantang.

Model atau teknik pengumpulan data yang dilakukan tidak hanya melalui studi pustaka, Namun dilakukan pula wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan atau sumber informasi yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

Studi pustaka dilakukan peneliti dengan beberapa cara, pertama mencari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan mengenai peran orang tua terhadap pendidikan secara online. Kedua, pencarian pustaka dengan mencari buku-buku yang berkaitan dengan peran orang tua dalam pendidikan. Wawancara dilakukan selama satu hari.

Pembahasan

Kebudayaan yang ada dan berkembang di Desa Mantang Besar merupakan modal dasar pembangunan yang mendapat pengaruh besar dari Agama Islam. Nuansa Islam tersebut dapat di lihat pada kegiatan keagamaan yang rutin di lakukan di Desa Mantang Besar seperti pengajian mingguan, yasinan, dan memperingati hari-hari besar Agama Islam. Sebagian besar masyarakat Desa Mantang adalah Suku Melayu serta bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Melayu.

Masyarakat Desa Mantang masih menjunjung tinggi kegiatan gotong royong

dalam kehidupan bermasyarakat yang dilakukan satu kali dalam seminggu. Setiap ada warganya yang sedang mengalami musibah atau sedang mengadakan syukuran atau pernikahan masyarakat Desa Mantang saling tolong menolong satu sama lain. Kerja bakti pada masyarakat Desa Mantang juga terlaksana dengan baik, setiap minggunya mereka mengadakan kerja bakti secara rutin.

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dalam sebuah penelitian kualitatif, maka informan penelitian sengaja dipilih oleh peneliti. Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah para orangtua yang memiliki anak dalam jenjang pendidikan, yang anaknya memiliki prestasi disekolah Yang ditentukan berdasarkan umur, pekerjaan, tingkat pendidikan.

Dalam penelitian ini, semua informan yang diambil peneliti merupakan orang tua yang bekerja sebagai nelayan, adapun karakteristik informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel. 1
Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Usia Anak	Prestasi Anak
1.	Mahid	70	Nelayan	SD	16	Siswa berprestasi
2.	Arfandi	35	Nelayan	SLTP	12	Siswa berprestasi
3.	Azwar	40	Nelayan	SD	17	Siswa berprestasi
4.	Saliah	34	Ibu Rumah Tangga	SD	12	Siswa berprestasi
5.	Alujiah	58	Ibu Rumah Tangga	SD	20	Siswa berprestasi
6.	Yanti	37	Ibu Rumah Tangga	SD	16	Siswa berprestasi
7.	Indra	35	Nelayan	SD	15	Siswa berprestasi
8.	Amran	40	Nelayan	SD	17	Siswa berprestasi

Sumber : Wawancara Informan Tahun 2016

Menanamkan Nilai Tentang Pentingnya Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak

mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya, Pendidikan tidak akan ada habisnya. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat

hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Kita dididik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan dilingkungan keluarga (Pendidikan Informal), lingkungan sekolah (Pendidikan Formal), dan lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal).

Menurut Agus salim (2008, 164), keluarga adalah lembaga pendidikan terkecil tempat sebuah kehidupan dimulai. Pendidikan dalam keluarga adalah sebuah proses pemindahan dan pembentukan kehidupan yang ada dalam diri bapak dan ibu. keluarga memberikan pembelajaran (tentang nilai-nilai) yang amat mendalam sering kali lebih tepat dan mendalam dari yang di sadari mereka, walaupun pengajaran ahli keluarga berlaku tidak resmi.

Pendidikan mempunyai nilai yang sangat penting. Nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga. Sehingga sesuatu yang dianggap berharga didalam pendidikan merupakan suatu hal yang harus di ajarkan kepada anak anak, yang bertujuan agar anak mampu mengetahui bahwa sesungguhnya ada nilai-nilai penting di dalam pendidikan tersebut, serta apakah yang dimaksud dengan nilai penting tersebut, dan bagaimana agar setiap masyarakat mampu meraih nilai penting supaya menjadi orang yang sukses.

Sebagai orang tua menerapkan pendidikan merupakan hal yang diharuskan, orang tua harus menanamkan nilai tentang pentingnya pendidikan bagi anak dapat dilihat dari pendidikan informal, formal, dan non formal yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan Informal (Pendidikan Dalam Keluarga)

Pendidikan Informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati. Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup. Sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orang tua. Orang tua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan orang tua tidak ada habisnya dan tidak terhitung nilainya. Orang tua mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik misalnya, bagaimana kita bersikap sopan santun terhadap orang lain, menghormati sesama, dan berbagi dengan mereka yang kekurangan.

Nilai pendidikan didalam keluarga sangat penting diajarkan, karena pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang paling awal didapatkan bagi setiap individu, melalui wawancara dengan informan bahwa nilai-nilai pendidikan didalam keluarga harus diajarkan kepada anak anak seperti ungkapan informan yang bernama Ibu Yanti yang berusia 37 tahun dan berpendidikan Sekolah Dasar yaitu sebagai berikut :

"...anak anak ya awalnya pasti mendapatkan pendidikan dari lingkungan keluarga, saye tak henti hentinye jage mengajarkan anak anak saye, pendidikan anak menjadi tanggung jawab orang tua, jadi seharusnya orang tue mengajarkan nilai nilai tersebut, saya menginginkan anak anak menjadi pribadi yang mempunyai karakter yang baik..."
(Ibu Yanti, wawancara tanggal 19 Juni 2016)

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang dapat menghasilkan pribadi-pribadi anak yang menjadi baik. Pendidikan dalam keluarga dapat memberikan pengaruh besar terhadap karakter anak. Sebab itu kunci utama untuk menjadikan pribadi anak menjadi baik yang terutama terletak dalam pendidikan dalam keluarga. Dan karakter yang ditumbuhkan adalah faktor yang amat penting dalam kepribadian anak, karena banyak mempengaruhi prestasi dalam berbagai bidang. Ilmu pengetahuan dan kemampuan teknik adalah penting untuk pencapaian keberhasilan, tetapi tidak akan mampu mencapai hasil maksimal kalau tidak disertai karakter.

Hal itu terutama karena pada waktu ini faktor karakter kurang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini semua harus menjadi salah satu hasil penting usaha pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga, pendidikan sekolah maupun pendidikan dalam masyarakat. Akan tetapi karena pendidikan pada anak paling dulu dimulai dalam pendidikan dalam keluarga, maka pendidikan dalam keluarga yang seharusnya memberikan dasar yang kemudian diperkuat dan dilengkapi dalam pendidikan sekolah dan pendidikan dalam masyarakat. Akhirnya memang tergantung pada para orang tua sendiri apakah pedoman itu dilaksanakan atau tidak. Akan tetapi karena secara alamiah orang tua ingin anaknya menjadi baik dan sukses, maka banyak kemungkinan orang tua akan berusaha menerapkan pedoman itu dalam hidup mereka.

Ketika orang tua disibukkan dengan segala aktifitas diluar rumah, tentunya waktu yang digunakan untuk mendidik anak-anaknya dilingkungan keluarga juga terbatas, namun

untuk menjadikan seorang anak yang berhasil dalam dunia pendidikan tentunya orang tua khususnya ibu rumah tangga di Desa Mantang mempunyai cara-cara tersendiri dalam mengajarkan nilai nilai pendidikan terhadap anak-anak mereka. Seperti ungkapan yang dipaparkan oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Alujiah yang berumur 58 tahun dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga yaitu sebagai berikut :

"...saya selalu menjadwalkan waktu agar anak-anak menjadi disiplin dalam belajar, ketika ada PR harus segera dikerjakan, kewajiban sekolah telah di selesaikan semua baru anak-anak boleh main atau keluar rumah, kalau mengajar anak-anak di rumah saya lebih kepada lemah lembut, saya tidak bisa berkeras kepada anak-anak karena kalau berkeras anak-anak akan terbebani dengan apa yang kita suruh...dan itu saya lakukan sejak anak saya berusia dini, sehingga sampai sekarang anak-anak masih menerapkan hal tersebut ..."(Ibu Alujiah, wawancara tanggal 19 Juni 2016)

Cara yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dalam mengajarkan nilai nilai pendidikan sekolah seperti yang diungkapkan oleh Ibu Alujiah diatas yaitu dengan cara selalu menerapkan sikap-sikap kedisiplinan, sehingga segala tugas-tugas sekolah harus di kerjakan sesuai dengan jadwal-jadwal yang telah disepakati, sedangkan untuk sistem pengajaran Ibu Alujiah lebih mengajarkan dengan cara yang lemah lembut, tidak dengan kekerasan sehingga hal tersebut membuat anak tidak memiliki beban dalam belajar dan terus dilakukan anak. Orang tua juga lebih mendidik dengan cara lemah lembut dan sabar, karena mereka menganggap pendidikan dengan cara yang kasar dan memaksa akan membuat seorang anak menjadi tertekan mentalnya, dan berujung pada tidak mau menuruti apa yang diajarkan orang tua.

Nilai-nilai penting dalam pendidikan sangat banyak, sehingga orang tua dituntut harus mampu mengajarkan kepada anak-anaknya, terkadang dengan kesibukan orang tua tidak bisa menyempatkan waktu untuk mengajarkan hal tersebut kepada anak-anak mereka, adapun tentang nilai-nilai penting dalam pendidikan yang diajarkan kepada anak-anak, ibu rumah tangga yang bernama Saliah yang memiliki Pendidikan SD, berusia 34 tahun memaparkan keterangan sebagai berikut :

"...mengajarkan pendidikan kepada anak yang saya lakukan yaitu, mengajarkan pendidikan agama, tentang akhlak mereka, budi pekerti dan itu didapatkan dilingkungan keluarga, tapi kalau pendidikan formal saya lebih menyerahkan kepada sekolah sepenuhnya, saya cuma berperan sedikit saja mengajarkan anak-anak kalau ada PR saja..."(Ibu Saliah, wawancara tanggal 19 Juni 2016)

Setiap orang tua dalam mengajarkan nilai-nilai pendidikan didalam keluarga, selalu mengajarkan kepada anak pendidikan agama seperti sholat, mengaji, karena pendidikan tersebut merupakan tugas berat keluarga yang harus dilakukan. Namun ada juga pendidikan pendidikan lainnya seperti menerapkan sikap menghargai, tolong menolong, saling menyayangi, menghormati yang lebih tua diajarkan didalam pendidikan keluarga, untuk pendidikan yang bersifat formal lainnya seperti belajar tentang alam, Negara, berhitung, Bahasa itu lebih di serahkan orang tua ke sekolah.

2. Pendidikan Formal (Pendidikan Sekolah)

Lingkungan sekolah menjadi pendidikan yang kedua, dan apabila orang tua mempunyai cukup uang maka dapat melanjutkannya ke

jenjang yang lebih tinggi dan akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi kemudian menjadi seorang yang terdidik. Alangkah pentingnya pendidikan itu. Guru sebagai media pendidik memberikan ilmunya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Peranan guru sebagai pendidik merupakan peran memberi bantuan dan dorongan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak dapat mempunyai rasa tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Guru juga harus berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup untuk menarik minat anak.

Bagi sebagian keluarga yang selalu sibuk dengan pekerjaan tentunya waktu yang diberikan untuk anak-anak sangat terbatas, sehingga masalah pendidikan anak-anak pun terkadang banyak yang tidak diperhatikan oleh orang tua, apalagi orangtua yang bekerja sebagai nelayan yang terlalu sibuk di laut yang bekerja. memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan disekolah sehingga, nilai-nilai pendidikan harus ditanamkan kepada anak-anak mereka, seperti keterangan yang diperoleh melalui informan yang bernama Indra berusia 35 tahun yang berpendidikan SD dan bekerja sebagai Nelayan yaitu sebagai berikut :

"...pendidikan itu sangat penting dek, sehingga sejak dini anak-anak harus diajarkan tentang segala nilai-nilai yang terkandung pada makna pendidikan tersebut, pendidikan juga akan mengantarkan anak pada dunia kerja yang lebih menjamin untuk masa depan dia, anak-anak tak akan bisa dibodoh-bodohkan orang lagi tujuan karir yang ingin dicapai akan terwujud..."(Indra, wawancara tanggal 19 Juni 2016)

Pendidikan sangat penting karena untuk melengkapinya kita dengan keahlian yang diperlukan dalam dunia kerja serta membantu

kita dalam mewujudkan tujuan karir. Keahlian merupakan pengetahuan yang mendalam mengenai suatu bidang tertentu yang dapat membuka peluang karir untuk masa depan. Sehingga dengan adanya pendidikan yang layak dan baik maka dapat membantu kita sebagai manusia untuk mewujudkan impian.

Melalui pernyataan yang diungkapkan oleh informan penelitian di atas hal tersebut juga di dukung oleh salah seorang informan penelitian yang bernama Amran, berusia 40 tahun, tamatan SD yang bekerja sebagai Nelayan yaitu sebagai berikut :

"...pendidikan anak saye selalu saye kasi tau agar mereka bise mendapatkan prestasi yang bagus mereka harus belajar di sekolah, karena pendidikan di sekolah itu merupakan hal yang sangat penting, disekolah anak anak bise belajar segala macam ilmu tidak seperti di rumah yang pengajarannya terbatas oleh kemampuan saye, jadi nilai nilai sekolah harus di terapkan ke anak anak. pendidikan skolah memberikan pencerahan karir kite,menjadikan manusia yang lebih baik..."(Amran, wawancara tanggal 19 Juni 2016)

Keterangan yang disampaikan oleh kedua informan diatas menyebutkan bahwa mereka menganggap bahwa pendidikan di sekolah memiliki nilai-nilai yang penting yaitu untuk karir atau pekerjaan. Pendidikan sangat penting karena untuk melengkapi kita dengan keahlian yang diperlukan dalam dunia kerja serta membantu kita dalam mewujudkan tujuan karir. Keahlian merupakan pengetahuan yang mendalam mengenai suatu bidang tertentu yang dapat membuka peluang karir untuk masa depan. Sehingga dengan adanya pendidikan yang layak dan baik maka dapat membantu kita sebagai manusia untuk mewujudkan impian.

Pentingnya pendidikan formal bagi manusia berikutnya adalah untuk menjadikan manusia yang lebih baik dan berkarakter. Pendidikan selain penting untuk karir juga sangat penting untuk menjadikan manusia agar lebih baik karena membuat kita beradab. Pada umumnya pendidikan adalah dasar dari budaya dan peradaban. Pendidikan membuat kita sebagai manusia untuk berpikir, menganalisa, serta memutuskan. Menumbuhkan karakter pada diri sendiri juga merupakan tujuan dengan adanya pendidikan, sehingga menciptakan Sumber Daya Manusia yang lebih baik.

Untuk kemajuan suatu bangsa, pendidikan sangat berperan penting didalamnya. Sehingga manusia yang baik membutuhkan suatu pendidikan. Dalam dunia yang kompetitif dan bersaing, pendidikan adalah jalan untuk dapat bersaing. Sebagian besar menyadari dengan adanya pendidikan yang baik maka menghasilkan manusia yang baik. Tidak hanya pendidikan saja, namun juga memerlukan keahlian yang cukup dalam membuat maju suatu bangsa.

Sebuah efek langsung dari pendidikan adalah dengan adanya mendapatkan pengetahuan yang luas. Pendidikan memberikan pelajaran yang begitu penting bagi manusia mengenai dunia sekitar, mengembangkan perspektif dalam memandang kehidupan. Pendidikan yang sebenarnya diperoleh dari pelajaran yang diajarkan oleh kehidupan kita. Maka dari itu banyak Pemerintah yang menganjurkan pendidikan yang baik dimulai sejak dini, agar ketika kelak dewasa mempunyai Sumber Daya Manusia yang baik.

Dengan adanya pendidikan sekolah dapat menghapuskan keyakinan yang salah didalam pikiran kita. Selain itu juga dapat membantu dalam menciptakan suatu gambaran yang jelas mengenai hal di sekitar kita, juga dapat menghapus semua kebingungan. Orang dengan pendidikan yang tinggi biasanya akan lebih bijak dalam menyelesaikan suatu masalah, hal ini dikarenakan mereka sudah mempelajari mengenai ilmu pendidikan dalam kehidupan.

Setiap orang tua memiliki berbagai cara untuk menanamkan nilai tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak, adapun cara yang dilakukan oleh Azwar yang berusia 40 tahun, bekerja sebagai Nelayan dalam menanamkan pentingnya pendidikan formal kepada anaknya yaitu sebagai berikut:

"...care yang lakukan ialah dengan selalu memberikan arahan dan contoh-contoh orang yang telah berhasil dengan mengenyam pendidikan sekolah, misalnya menunjukan gambar pahlawan, itulah gunenye bersekolah kalo kita mau jadi pahlawan negare kita harus berpendidikan, kalau tak berpendidikan kita tak kan bise jadi seperti itu, gitu lah care saye mngajarkan kepede mereke bahwa pendidikan tu penting...(Azwar, wawancara tanggal 19 Juni 2016)

Dari pernyataan informan diatas dapat dikatakan bahwa orang tua selalu mempunyai cara tersendiri untuk menanamkan nilai bahwa pendidikan itu merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti cara yang dilakukan oleh bapak Azwar di Desa Mantang yaitu berusaha menjelaskan apa dampak yang bisa didapatkan dengan berpendidikan tinggi, sehingga anak menjadi termotivasi untuk meraih apa yang dicita-citakan dengan belajar yang sungguh supaya menjadi seperti apa yang diinginkan.

3. Pendidikan Non Formal (Pendidikan di Lingkungan Masyarakat)

Mengajarkan Pendidikan kepada anak tidak hanya terlepas dari pendidikan keluarga dan sekolah saja, namun pendidikan di lingkungan masyarakat juga harus ditanamkan kepada anak. Pendidikan Nonformal adalah pendidikan di luar sekolah, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang secara teratur, terarah. Berhubung karena Pendidikan Nonformal lebih mudah disesuaikan dengan keadaan seseorang dan lingkungan maka pendidikan Nonformal lebih terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini berarti memberikan gambaran tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat. Dengan demikian apabila kita berinteraksi dengan mereka di lingkungan masyarakat maka mereka akan menilai kita, bahwa mereka akan tahu mana orang yang terdidik, mana orang yang tidak terdidik berarti kita dididik untuk bisa memahami, mengerti, serta menjadi orang yang peduli terhadap orang lain. Di zaman Era Globalisasi diharapkan generasi muda bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat sehingga tidak terombang-ambing dalam kancah perkembangan zaman.

Pentingnya mengajarkan pendidikan nonformal atau pendidikan di lingkungan masyarakat kepada anak, seperti yang diungkapkan oleh informan penelitian yang bernama Arfandi yang bekerja sebagai Nelayan, dan berusia 35 tahun serta berpendidikan SLTP memaparkan hal dibawah ini yaitu sebagai berikut :

"..ie, pendidikan di lingkungan masyarakat jage sangat penting di ajarkan kepede anak, karene kite hidup ni saling berinteraksi jadi perlu tata krama di dalam masyarakat, kalau prilaku kite baik

maka orang pasti akan menilai kite sebagai orang yang terdidik, orang yang terdidik tu sudah pasti selalu mencerminkan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam masyarakat baik itu dari sopan santun, tatakrama dan lainnya tu...”(Arfandi, wawancara tanggal 19 Juni 2016)

Dari keterangan yang disampaikan oleh informan di atas dapat dikatakan bahwa orang tua harus mengajarkan tentang pendidikan non formal kepada anak, agar anak memahami sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat, karena terdidik atau tidaknya seseorang dapat dilihat dari tutur spanya terutama pada orang yang lebih tua.

Orang tua di Desa Mnatang selalu menanamkan nilai tentang pentingnya pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat kepada anak mereka, adapun cara yang dilakukan oleh orang tua di Desa Mantang yaitu seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Mahid berusia 70 tahun memiliki seorang cucu dan juga bekerja sebagai Nelayan memaparkan sebagai berikut :

"...care yang dilakukan ye, mengajarkan kepada anak tentang bagaimana bertutur kate yang baik, sopan santun yang bagus, dengan catatan saye juge harus lebih dahulu begitu, saye mengarkan bahwa kalau kite bagus dilingkungan masyarakat kite akan di segan nantinya oleh masyarakat, kite juge akan di hargai oleh setiap orang, tak di benci orang banyak...dan itu sejak keil sudah di ajarkan...”(Mahid, wawancara tanggal 19 Juni 2016)

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa cara orang tua dalam mengajarkan tentang nilai pentingnya pendidikan di lingkungan masyarakat yaitu di peroleh oleh anak melalui pendidikan informal (keluarga) terlebih dahulu yang telah diterapkan sejak kecil, yang mana di dalam keluarga anak di ajarkan

tentang sopan santun, cara berinteraksi yang baik di lingkungan masyarakat, serta hal tersebut di contohkan langsung oleh orangtuanya. Adapun nilai yang di ajarkan yaitu bahwa apabila di lingkungan masyarakat ingin di segani, di hormati atau di hargai maka hal tersebut harus berawal dari sikap (etika) seseorang. Baik sikap (etika) seseorang menandakan seseorang tersebut berpendidikan, namun sering juga di jumpai bahwa tidak baik perilaku seseorang padahal ia berpendidikan, hal tersebut menandakan bahwa pendidikan yang ia dapatkan tidak diterapkan dengan baik.

Menurut I Wayan Koyan (2000 :12), nilai adalah segala sesuatu yang berharga. Menurutnya ada dua nilai yaitu nilai ideal dan nilai aktual. Nilai ideal adalah nilai-nilai yang menjadi cita-cita setiap orang, sedangkan nilai aktual adalah nilai yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari keterangan yang disampaikan oleh informan di atas dapat di simpulkan bahwa peran orangtua di Desa Mantang selalu mengajarkan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak mereka, pendidikan mempunyai nilai ideal dan nilai aktual.

Secara keseluruhan adapun Nilai ideal tentang pendidikan yang diajarkan orangtua kepada anak mereka yaitu baik itu dari pendidikan formal, informal dan non formal yaitu khusus tentang nilai agama yaitu orang tua menginginkan anak-anak mereka bisa kedepannya menerapkan perilaku terpuji seperti mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai sopan santun, saling harga menghargai, tolong menolong, sedangkan untuk nilai aktual dari nilai ideal yang diajarkan tersebut, orang tua senantiasa membimbing anak-anak mereka

untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sejak anak usia dini, sehingga sampai anak memasuki usia Sekolah Menengah Atas (SMA) nilai tersebut telah menjadi kebiasaan, sehingga berpengaruh kepada perilaku anak-anak walaupun orang tua disibukkan dengan pekerjaan anak-anak mampu mendapatkan prestasi di sekolah.

Kesimpulan

Pada dasarnya setiap keluarga memiliki berbagai aktivitas, salah satu aktivitas yang selalu dilakukan oleh keluarga yaitu bekerja, aktivitas tersebut merupakan kewajiban dari seorang suami namun tidak menutup kemungkinan istri sebagai ibu rumah tangga juga memilih untuk bekerja. Di Desa Mantang merupakan desa yang masih tradisional dalam segi budaya sebagaimana diketahui bahwa tugas utama orangtua adalah mengurus anak seperti dari segi pendidikan. Seorang ibu dan ayah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, agar anak menjadi pintar, selalu berprestasi di segala bidang baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun peran yang dilakukan oleh ayah dan ibu dalam rumah tangga dalam pendidikan anak dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

1. Menanamkan nilai tentang pentingnya pendidikan, pendidikan merupakan hal yang penting, baik itu pendidikan formal, informal maupun pendidikan non formal dan nilai tersebut telah diajarkan sejak anak masih di usia dini, sehingga sampai anak menginjak usia remaja. Nilai yang dilakukan oleh seorang ibu yang bekerja yaitu berupa nilai yang ideal khususnya tentang nilai agama karena orang tua menginginkan anak mereka bisa kedepannya menerapkan

perilaku terpuji seperti mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai sopan santun, saling menghargai, tolong menolong, sedangkan untuk nilai aktual dari nilai ideal yang diajarkan berpengaruh kepada perilaku anak-anak walaupun orang tua disibukkan dengan pekerjaan anak-anak mampu mendapatkan prestasi di sekolah.

2. Melakukan bimbingan kepada anak-anak, dalam memberikan bimbingan ibu di Desa Mantang lebih memberikan bimbingan tentang pembentukan kepribadian anak yang dibentuk sejak anak masih usia dini, serta bimbingan dalam pendidikan dilakukan dengan membimbing anak saat belajar, mengatur kedisiplinan anak, menjadi pendengar fasif dan segera memberi solusi apabila anak menghadapi kesulitan dalam belajar, ketika orang tua sibuk dan anak menghadapi kesulitan orang tua selalu memberikan bimbingan dengan meminta bantuan kepada guru.

Adapun saran yang bisa diberikan yaitu:

1. Untuk orang tua yang disibukkan bekerja sebagai nelayan, walaupun dengan waktu terbatas, harus selalu memberikan pencerahan tentang nilai-nilai penting pendidikan, bisa memberikan bimbingan, arahan kepada anak agar anak selalu memahami bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga tidak boleh diabaikan begitu saja, serta sebisa mungkin mampu melengkapi fasilitas belajar anak yang mampu menunjang prestasi.
2. Untuk anak-anak agar selalu mengikuti nilai pendidikan sebagai pedoman untuk

sukses tanpa terus di suruh oleh orang tua, selalu mengikuti segala bimbingan dari orang tua sehingga selalu menjadi anak yang berprestasi dan dibanggakan oleh semua masyarakat, serta memanfaatkan sebaik mungkin fasilitas yang telah di sediakan orang tua untuk belajar.

Daftar Pustaka

- Ahmadi. Abu, 2007. *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta : Jakarta
- Ary. H. Gunawan, 2010. *Sosiologi Pendidikan, Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*, RinekaCipta : Jakarta
- Amrullah, M, 2012. *Pengaruh Ibu Bekerja Terhadap Pendidikan Anak*, Pada MPA karangrejtulungagung.
- Dewi Wulansari, 2009. *Sosiologi: Konsep dan Teori* Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Hurlock, Elizabeth, B. 2006. *Psikologi Perkembangan*, Erlangga : Jakarta
- I Wayan Koyan, 2000. *Pendidikan Moral Pendekatan Lintas Budaya*. Jakarta:Depdiknas.
- Khairuddin. H, 2008. *Sosiologi Keluarga*, Liberty : Yogyakarta
- Martono. Nanang, 2012, *Sosiologi Perubahan Sosial*, RajawaliPers: Jakarta
- Narwoko. D. BagongSuyatno, 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana : Jakarta
- Nurhadi. M, 2009. *Perubahan peran Ibu Rumah Tangga dan Pengaruhnya terhadap Harmonisasi Rumah Tangga*, Jurnal Sosiologi Pada Universitas Sebelas Maret
- Saebeni. B. 2008. *Metode Penelitian*, CV PustakaSetia, EdisiKedua, Bandung
- Setiadi. 2008, *Konsep dan Keperawatan Keluarga*, PenerbitPustakaPelajar : Yogyakarta
- Silalahi. U. 2012. *MetodePenelitian Sosial*, RefikaAditama, Bandung
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta: Bandung
- Sunarto. Kamanto, 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
- Soekanto. S, 2004. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Penerbit Rineka Cipta : Jakarta
- , 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Jakarta

KEDAI KOPI SEBAGAI RUANG PUBLIK: STUDI TENTANG GAYA HIDUP MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG

Teguh Setiandika Igiassi
(Minoritas.instruktur@gmail.com)

Program Studi Sosiologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan kedai kopi sebagai ruang publik bagi masyarakat Kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu Kedai Kopi Sebagai Ruang Publik: Studi tentang Gaya Hidup Masyarakat Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beragam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tanjungpinang di kedai kopi. Aktivitas yang dilakukan masyarakat tidak hanya sebatas minum kopi dan makan makanan yang ada, namun terdapat beragam aktivitas baik itu aktivitas yang serius hingga aktivitas ringan. Beragamnya aktivitas yang dilakukan di kedai kopi telah memberikan kepuasan sehingga masyarakat rela menghabiskan waktu yang tidak sebentar di kedai kopi. Keragaman yang terdapat di kedai kopi bukan hanya keragaman aktivitas semata, latar belakang dan status pengunjung kedai kopi juga terdapat keragaman. Hal ini semakin menguatkan peranan kedai kopi sebagai ruang publik bagi masyarakat Kota Tanjungpinang dan pada akhirnya menjadi gaya hidup dalam masyarakat Kota Tanjungpinang.

Kata kunci : kedai kopi, ruang publik, aktivitas, gaya hidup, masyarakat Tanjungpinang.

Pendahuluan

Kopi pada dasarnya merupakan sesuatu yang menarik untuk dibicarakan, karena kopi menjelma menjadi sesuatu yang selalu diburu dan digemari dari dulu hingga saat ini di Indonesia. Apabila kita berbicara mengenai kopi, maka tidak terlepas dengan tempat yang menawarkan atau menjual aneka minuman kopi yaitu kedai kopi. Keberadaan kopi yang semakin dicari pada saat ini mendorong lahirnya kedai-kedai kopi dengan segala hal bernuansa modern yang menawarkan kopi dengan berbagai jenis, rasa dan penyajiannya. Kedai-kedai kopi bernuansa modern (*coffe shop*) dengan berbagai nama terkenal di dunia bermunculan di kota-kota Indonesia, namun keberadaan *coffe*

shop tersebut belum mampu memusnahkan keberadaan kedai-kedai kopi tradisional yang telah duluan hadir.

Minum kopi mungkin merupakan satu dari sedikit kata kerja yang bisa mewakili banyak aktivitas. Mulai dari menyantap makanan dan minuman, negosiasi bisnis, tukar pikiran dalam pekerjaan, reuni dengan kawan lama, sampai bincang-bincang non formal di pinggir jalan. Minum kopi di kedai kopi (*ngopi*) juga adalah aktivitas yang tak peduli status sosial, tanpa membedakan perbedaan jenis kelamin, strata sosial, usia atau apapun yang dapat menjadi penyekat kepopuleran sebutan *ngopi* ini. Kedai kopi tidak membedakan pengunjungnya baik

laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, tua ataupun muda, dari orang tidak terhormat-hampir terhormat-bahkan yang katanya terhormat semua bisa beraktivitas di kedai kopi.

Tanjungpinang menjadi salah satu kota yang menggambarkan kejadian tersebut. Keberadaan kedai-kedai kopi di kota Tanjungpinang masih kokoh bahkan semakin bertambah banyak jumlahnya. Kedai-kedai kopi tradisional di Tanjungpinang masih bisa bersaing dengan kehadiran *coffe shop*, bahkan kedai kopi di Tanjungpinang bisa dikatakan masih unggul dalam mencuri hati masyarakat Tanjungpinang. Bagi sebagian masyarakat di Tanjungpinang, mengunjungi kedai kopi merupakan suatu kebutuhan dan kebiasaan. Pentingnya kedai kopi bagi masyarakat Tanjungpinang tersebut juga dapat terlihat dari cerita-cerita masyarakat Tanjungpinang ketika berjalan ke kota lainnya di luar Kepulauan Riau (Kepri), banyak orang yang mengeluhkan sulitnya mencari kedai kopi di kota lain. Ini menandakan arti pentingnya kedai kopi bagi sebagian masyarakat kota Tanjungpinang.

Aktivitas di kedai kopi (*ngopi*) yang menjadi salah satu kebutuhan bagi sebagian masyarakat yang ingin mengisi waktu luang setelah menjalani rutinitas. Pada awalnya, kedai kopi hanyalah sebagai tempat mengisi waktu luang, tempat melepas lelah baik secara individu maupun komunal atau berkelompok. Pada saat ini kedai kopi sudah mengalami pergeseran makna, mengunjungi kedai kopi pada saat ini bukan hanya sebagai tempat sebagian orang melakukan aktivitas konsumsi semata akan tetapi mengunjungi kedai kopi juga sudah menjadi salah satu gaya hidup bagi sebagian masyarakat Tanjungpinang bahkan masyarakat kota pada umumnya saat ini. Gaya hidup

masyarakat kota Tanjungpinang dengan menghabiskan waktu di kedai kopi ini tidaklah memakan waktu yang sebentar. Seringkali keberadaan masyarakat di kedai kopi memakan waktu yang cukup lama dan itu semua mereka lewati pastinya dengan beberapa aktivitas.

Dilihat dari keragaman aktivitas dan latar belakang serta status pengunjung kedai kopi, maka kedai kopi menunjukkan perannya sebagai ruang publik bagi masyarakat khususnya kota Tanjungpinang. Peran kedai kopi sebagai ruang publik inilah yang menurut dugaan penulis menyebabkan kenyamanan tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat Tanjungpinang. Kenyamanan yang berkelanjutan dan berlangsung turun temurun tersebut membuat aktivitas masyarakat di kedai kopi (*ngopi*) seolah menjadi suatu gaya hidup dalam masyarakat Kota Tanjungpinang.

Seperti diketahui bersama, bahwa gaya hidup merupakan gambaran keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Gaya hidup menggambarkan pola aksi dan interaksi seseorang dengan lingkungannya dalam artian gaya hidup dikenali dengan melihat aktivitas, minat dan pandangan (opini) seseorang dalam kehidupan kesehariannya.

Kehadiran kedai kopi sebagai ruang publik yang akhirnya menimbulkan kenyamanan bagi masyarakat mendorong munculnya budaya *ngopi* di kalangan masyarakat Tanjungpinang seolah *ngopi* menjadi gaya hidup bagi masyarakat Tanjungpinang. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul "*Kedai Kopi Sebagai Ruang Publik Masyarakat Kota Tanjungpinang (Studi Tentang Gaya Hidup*

Masyarakat Kota Tanjungpinang)”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu kedai kopi sebagai Ruang Publik Masyarakat Kota Tanjungpinang (Studi Tentang Gaya Hidup Masyarakat Kota Tanjungpinang). Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang berupaya memahami dan membuat mengerti mengenai suatu fenomena dari sisi perspektif partisipan (Sharan B Merriam dkk, 2002:6).

Melihat besarnya jumlah kedai kopi dan pengunjungnya di Tanjungpinang dan demi keakuratan data, maka penulis menggunakan *Snowball Sampling* (Hanasse Malo dan M. Iqbal Djajadi:169) yang menyerupai cara pembuatan bola salju dalam menentukan subjek atau informan penelitian. Penarikan subjek bola salju ini memiliki beberapa tahapan. Pertama, menentukan beberapa orang atau responden untuk diwawancarai. Responden tersebut berperan sebagai titik awal penarikan subjek penelitian. Responden selanjutnya ditetapkan berdasarkan petunjuk dari responden sebelumnya. Petunjuk tersebut diberikan menyangkut mereka yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian. Kemudian peneliti mewawancarai responden tersebut dan demikian selanjutnya hingga penulis merasa jumlah responden telah mencukupi.

Pembahasan

Kedai Kopi Sebagai Ruang Publik

Kebutuhan masyarakat kota Tanjungpinang akan suatu tempat untuk mengekspresikan diri seutuhnya mengarahkan

masyarakat Tanjungpinang menuju kedai kopi yang ada di Kota Tanjungpinang. Ekspresi kemauan dan kritik yang mau diungkapkan di kedai kopi hingga lama kelamaan kedai kopi menjadi suatu ruang publik. Artinya, kedai kopi merupakan sebuah tempat dengan keleluasan berekspresi, berpendapat dan saling menghargai pendapat masyarakat lainnya dalam sistem pemerintahan kota yang demokratis (F. Budi Hardiman, 2010:283).

Singkat kata, kedai kopi memuat sesuatu yang tidak sesederhana sebutannya. Ia telah menjadi ruang publik dalam pengertian tempat (*place*) dan ruang (*space*). Sebagai tempat (*place*) kedai kopi merupakan ruang untuk kegiatan atau tempat aktivitas jual-beli makanan-minuman, tempat bekerja (bagi pelayan dan pemilik), bersantai (bagi pengunjung). Sebagai ruang (*space*) kedai kopi menjadi ruang bagi muncul dan berkembangnya interaksi, komunikasi antar pengunjung, pemilik atau bahkan pelayan sekalipun. Kedai kopi akhirnya menjadi ruang publik dalam arti sebenarnya, baik fisik maupun non fisik.

Ruang publik dapat diartikan sebagai ruang bagi diskusi kritis yang terbuka bagi semua orang. Pada ruang publik, individu masyarakat berkumpul untuk membentuk sebuah publik dimana nalar publik ini akan diarahkan untuk mengawasi kekuasaan pemerintah dan kekuasaan negara. Ruang publik mengasumsikan adanya kebebasan berbicara dan berkumpul, pers bebas dan hak secara bebas berpartisipasi dalam perdebatan politik dan pengambilan keputusan. Lebih lanjut, ruang publik dalam hal ini terdiri dari media informasi seperti surat kabar dan jurnal. Juga termasuk dalam ruang publik adalah tempat minum dan

kedai kopi, balai pertemuan, serta ruang publik lain dimana diskusi sosio-politik berlangsung.

Keberadaan kedai kopi sebagai ruang publik dapat dilihat dengan aktivitas masyarakat selama berada di kedai kopi. Kedai kopi menjadi tempat diskusi bebas masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda mengenai segala hal. Termasuk mengenai kondisi sosio-politik kekinian yang terjadi di sekitar masyarakat. Seringkali masyarakat berdiskusi mengenai berbagai kebijakan pemerintah dalam segala hal, penyelewengan yang dilakukan pejabat negara dan kondisi sosio-politik lainnya dalam rangka mengawasi kekuasaan negara. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Lingga Kelana mengenai obrolan di kedai kopi yang digambarkan dalam kutipan wawancara berikut.

Saya biasa ngopi dengan beberapa kawan saya, biasanya kami ngobrol tentang banyak hal. Seringnya sih kami ngobrol santai sambil bergurau, tapi kami sering juga ngobrol hal-hal berat tentang daerah sampai negara. Kalau sudah bahas negara, kami dah macam orang paling faham di bidang politik-pemerintahan gitu. Kalo dah gitu tak heran sampai debat-debat dalam mempertahankan pendapat.

Kedai kopi yang merupakan ruang publik menjadikan masyarakat bebas berpendapat mengenai berbagai hal yang diperhatikannya, termasuk sosio-politik dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah dan negara. Pembicaraan kedai kopi seringkali membicarakan sesuai kondisi kekinian di daerah, negara bahkan dunia. Fungsi kedai kopi sebagai ruang publik ini seringkali dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti sosial dalam memperoleh data yang dibutuhkan, meskipun keakuratan datanya masih harus diuji terlebih dahulu.

Ruang publik ditandai oleh tiga hal yaitu responsif, demokratis dan bermakna. Responsif dalam arti ruang publik adalah ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas. Demokratis dalam arti ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan budaya bagi berbagai kondisi fisik manusia. Bermakna memiliki arti kalau ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang dan dunia luas dengan konteks sosial.

Fungsi kedai kopi sebagai ruang publik yang responsif ditandai dengan banyaknya ragam aktivitas yang berlangsung di kedai kopi sesuai dengan kebutuhan pengunjung kedai kopi yang ada. Kedai kopi bisa dijadikan tempat menyantap makanan dan minuman, dapat menjadi tempat berkumpul dengan kerabat dan sahabat, berdiskusi dan bersenda gurau dalam diskusi ringan, berdiskusi serius hingga perdebatan alot, penyelesaian urusan kerja atau bisnis yang tidak bisa diselesaikan di kantor dan beragam aktivitas lainnya.

Keragaman latar belakang pengunjung kedai kopi semakin menunjukkan ciri kedai-kedai kopi sebagai ruang publik. Belum lagi kebebasan berpendapat tanpa harus ada tersinggung dalam interaksi sosial yang terjadi di kedai kopi. Pengunjung kedai kopi memang tidak pernah dibatasi berdasarkan latar belakang tertentu. Jika kita perhatikan, beraneka ragam orang yang senantiasa duduk dan beraktivitas di kedai kopi. Mulai dari yang muda sampai yang tua, laki-laki dan perempuan, kaya hingga miskin, berbagai latar belakang suku bangsa, berbagai latar belakang pekerjaan, berbagai latar belakang pendidikan. Interaksi sosial yang terjadi di kedai kopi bukan hanya terjadi antara penjual dan

pembeli semata atau sesama mereka yang kenal saja, interaksi juga terjadi dengan mereka yang tidak saling kenal. Hal ini biasanya dikarenakan adanya pembicaraan menarik di sebuah meja yang menarik orang dari meja lain yang mendengar ikut berpendapat dalam pembicaraan tersebut meskipun mereka tidak saling kenal. Ini semakin menunjukkan betapa demokratisnya kedai kopi ini dalam aktivitas pengunjungnya.

Ragam aktivitas yang berlangsung di kedai kopi pastinya menimbulkan interaksi sosial yang tidak sedikit, hal ini akan semakin bermakna ketika interaksi sosial tersebut menghasilkan jaringan sosial baru ataupun memperkuat hubungan sosial yang ada sebelumnya. Aktivitas di kedai kopi tersebut juga semakin bermakna dengan semakin bertambahnya informasi atau pengetahuan seseorang dari hasil beraktivitas di kedai kopi. Meskipun tetap saja ada sekelompok orang yang menganggap aktivitas yang lama di kedai kopi merupakan aktivitas yang mubazir atau sia-sia.

Ngopi Sebagai Gaya Hidup Masyarakat

Animo pengunjung kedai kopi tidak mutlak muncul oleh rasa dan aroma kopi yang disajikan, tetapi lebih kepada keinginan untuk berinteraksi. Buktinya, sebagian besar kedai kopi yang ada di Indonesia bahkan di Tanjungpinang hanya menyediakan minuman kopi berbahan baku kopi robusta. Padahal, bagi para "penikmat" kopi sejati, mereka pasti akan mencari kedai kopi atau cafe yang menyediakan kopi arabica, karena aroma yang tajam dan rasanya yang khas. Tetapi bagi pengunjung setia kedai kopi, tetap mempertahankan atau menjadikan kedai kopi salah satu aktivitas sehari-hari yang juga memiliki peran penting

dalam kehidupan sehari-hari.

Kejadian ini mempertegas makna minum kopi (*ngopi*) dalam tradisi masyarakat di Tanjungpinang. Aktifitas minum kopi adalah media interaksi antar masyarakat dari berbagai stratifikasi sosial. Fungsi kedai kopi mulai bergeser, dari tempat minum menjadi ranah publik milik semua elemen masyarakat baik sebagai tempat melepas lelah, tempat bercengkrama bahkan termasuk sebagai ruang hiburan. Secangkir kopi menjadi semacam e-mail dan password untuk izin menikmati suasana dan aktifitas orang yang ada di kedai kopi. Maksudnya bahwa dengan hanya memesan secangkir kopi, masing-masing individu dapat menikmati kebebasan berekspresi dan berpendapat hingga waktu yang cukup lama.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat di kedai kopi menimbulkan kenyamanan tersendiri bagi masyarakat berada di kedai kopi. Makanya seringkali masyarakat menghabiskan waktu yang cukup lama bahkan lama di kedai kopi. Kenyamanan tersebut berlangsung terus menerus bahkan turun temurun, sehingga aktivitas di kedai kopi (*ngopi*) menjadi gaya hidup masyarakat di Tanjungpinang.

Secara teori, gaya hidup menggambarkan pola beraksi dan berinteraksi seseorang di lingkungannya. Secara umum gaya hidup dapat dilihat dengan bagaimana seseorang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang dianggap penting bagi seseorang (minat) dan apa yang dipikirkan seseorang mengenai dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya (opini). Singkatnya gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam aktivitas, minat dan pendapat atau opininya.

Aktivitas masyarakat Tanjungpinang di kedai kopi atau yang populer dengan istilah *ngopi* telah menjadi gaya hidup masyarakat Tanjungpinang. Bahkan gaya hidup ini telah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi. Ini dapat dikatakan gaya hidup karena waktu yang dihabiskan masyarakat Tanjungpinang di kedai kopi setiap harinya pasti ada. Meskipun durasi aktivitas masyarakat Tanjungpinang di kedai kopi berbeda setiap hari atau minggunya.

Aktivitas masyarakat saat berada di kedai kopi sangat beragam, mulai dari menikmati atau sekedar membeli aneka makanan dan minuman (aktivitas konsumsi), berkumpul atau bersosialisasi dengan kerabat (aktivitas sosial), menyelesaikan urusan yang tidak selesai di balik meja kantor (aktivitas kerja), membuat rencana atau kesepakatan bisnis (aktivitas bisnis), belajar bersama maupun menyelesaikan tugas sekolah atau kampus (aktivitas belajar) hingga bersantai melepas lelah atau mencari hiburan (aktivitas hiburan). Beragam aktivitas tersebut dapat kita saksikan di kedai kopi setiap harinya, bahkan kadangkala dalam durasi waktu yang cukup panjang.

1. Aktivitas konsumsi di kedai kopi

Kedai kopi pada hakikatnya merupakan tempat yang hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam hal makanan dan minuman bagi masyarakat. Tingginya rutinitas yang dilakukan masyarakat dalam bekerja setiap harinya semakin meningkatkan gaya hidup konsumtif di kalangan masyarakat. Makanya kedai kopi cenderung lebih ramai di saat jam-jam sebelum orang bekerja, saat istirahat siang para pekerja bahkan saat jam-jam pulang kerja hingga malam hari.

Masyarakat yang berada di kedai kopi pada umumnya melakukan aktivitas konsumsi di kedai kopi. Meskipun mereka juga melakukan aktivitas lainnya di kedai kopi tersebut, aktivitas konsumsi biasanya tetap dilakukan oleh masyarakat. Minimal mengonsumsi secangkir kopi atau minuman lainnya yang ada, seseorang bisa beraktivitas di kedai kopi tersebut dalam durasi waktu yang lama. Memesan minuman apapun di kedai kopi seakan menjadi *password* atau kata sandi untuk dapat beraktivitas di kedai kopi.

2. Aktivitas sosial di kedai kopi

Salah satu aktivitas yang pada umumnya atau sering di jumpai di kedai kopi adalah aktivitas sosial. Aktivitas sosial di sini adalah terjadinya interaksi antara individu-individu yang berada di kedai kopi. Interaksi antara pengunjung dengan pelayan kedai kopi maupun interaksi sesama pengunjung kedai kopi. Biasanya interaksi antara pengunjung kedai kopi terjadi antara mereka yang duduk satu meja atau sudah saling kenal. Namun tidak jarang pula orang dari meja lain atau yang belum dikenal ikut berinteraksi dalam percakapan yang terjadi.

Selain aktivitas konsumsi, aktivitas sosial merupakan aktivitas yang pada umumnya dilakukan masyarakat di kedai kopi. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kebutuhan hidup manusia bukan hanya sebatas sandang, pangan dan papan. Ada kebutuhan sosial yang juga harus dipenuhi oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Bukankah manusia merupakan makhluk sosial, makanya tidak heran ketika seseorang membutuhkan orang lain sebagai proses interaksi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan sosialnya.

3. Aktivitas kerja di kedai kopi

Aktivitas kerja umumnya memang berlangsung di kantor atau tempat-tempat kerja lainnya. Namun tidaklah merupakan suatu pelanggaran ketika urusan kantor bergeser di kedai kopi. Terkadang memang ada beberapa hal yang sulit atau tidak bisa diselesaikan di balik meja-meja kantor, makanya kedai kopi seringkali hadir sebagai solusi untuk menyelesaikan yang belum terselesaikan. Kantor terkadang menghadirkan nuansa kaku dalam suatu hubungan sosial di tempat kerja. Seringkali strata sosial di kantor menjadikan kekakuan dalam kerjasama tim ketika berada di kantor.

Kedai kopi cukup efektif dalam menyelesaikan urusan-urusan pekerjaan kantor yang tidak terselesaikan di balik meja kantor. Ketika kantor tidak mampu menyelesaikannya, maka kedai kopi hadir sebagai solusi jitu bagi para pekerja kantoran. Ada sebuah anekdot yang berkembang di kedai kopi, bahwa aktivitas kerja di kedai kopi di sebut juga "rakor" (RAPat, KOpi dan Rokok).

Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan kedai kopi saat ini juga mulai menunjang aktivitas kerja seseorang di kedai kopi. Tidak sedikit kedai kopi yang mulai menyediakan fasilitas *wifi* bagi para pengunjunnya, walaupun kedai kopi yang tidak ada *wifi* masih bisa digunakan untuk tempat menyelesaikan pekerjaan. Selain rapat-rapat yang membahas pekerjaan, kedai kopi sering kali dipergunakan sebagai tempat untuk menyusun rencana-rencana maupun laporan-laporan pekerjaan. Karena tidak jarang aktivitas pengunjung lain di kedai kopi memberikan inspirasi seseorang.

4. Aktivitas bisnis di kedai kopi

Aktivitas bisnis secara umum sering terjadi di kedai kopi. Biasanya pelaku bisnis menengah ke bawah seringkali melakukan transaksi bisnis ataupun hanya sekedar membahas perencanaan bisnis di kedai kopi. Namun bukan berarti pelaku bisnis besar tidak pernah merencanakan bisnis atau bertransaksi bisnis di kedai kopi. Hal ini dikarenakan transaksi bisnis berskala besar tidak dapat teridentifikasi di kedai kopi.

Kemajuan teknologi saat ini yang melahirkan bisnis *on-line* dalam kota yang seringkali kedapatan melakukan transaksi di kedai kopi. Meja-meja di kedai kopi menjadi saksi atas transaksi bisnis yang terjadi di kedai kopi. Entah berapa besar transaksi yang pernah terjadi di kedai kopi, karena dari bisnis terkecil sampai bisnis besarpun pernah bertransaksi di kedai kopi.

5. Aktivitas belajar di kedai kopi

Aktivitas belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidaklah selalu bergantung di sekolah atau kampus pada jam belajar atau kuliah. Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan kedai kopi saat ini juga mulai menunjang aktivitas belajar seseorang di kedai kopi. Fasilitas *wifi* yang ditawarkan beberapa kedai kopi cukup membantu pekerjaan rumah atau tugas dari para pencari ilmu yang datang ke kedai kopi.

Aktivitas belajar di kedai kopi tidak selalu bergantung pada fasilitas *wifi*. Seringkali mereka memanfaatkan kedai kopi sebagai tempat belajar bersama, menghimpun data-data lapangan hingga menyusun laporan-laporan dalam bentuk penulisan. Diskusi-diskusi ilmiah pun sering mewarnai aktivitas di kedai

kopi. Meskipun diselingi dengan senda gurau para pencari ilmu yang hadir. Transfer pengetahuan bahkan ideologi seringkali berlangsung di kedai kopi secara lembut dan halus.

6. Aktivitas hiburan di kedai kopi

Aktivitas hiburan di kedai kopi sebenarnya merupakan aktivitas yang seragam dengan aktivitas sosial di kedai kopi. Seperti yang disinggung sebelumnya, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sosialisasi sebagai bentuk eksistensi dirinya. Tidak dapat dipungkiri, beragam bentuk sosialisasi juga merupakan hiburan tersendiri bagi setiap individunya. Karena sosialisasi menimbulkan rasa kepuasan tersendiri bagi individu yang menjalaninya.

Aktivitas hiburan di kedai kopi yang dimaksud dalam poin ini adalah aktivitas yang menyenangkan dalam bentuk permainan maupun penampilan. Banyak kedai kopi yang sekarang menyediakan fasilitas televisi dengan tampilan layar besar menggunakan *infocus* sebagai hiburan bagi para pengunjung. Biasanya pada momen-momen tertentu kedai kopi yang menyediakan fasilitas seperti ini akan dipenuhi dengan pengunjung. Momen-momen tersebut seperti pertandingan sepakbola ataupun balap.

Ada juga kedai kopi yang menyediakan permainan catur atau domino yang bisa dimainkan oleh para pengunjung. Permainan-permainan tersebut disajikan untuk dapat menghibur dan membuat pengunjung betah berada di sana. Pengunjung bahkan menghabiskan waktu sehari atau semalaman bermain catur atau domino tersebut.

Kedai kopi seperti menjadi sesuatu yang dianggap penting oleh sebagian besar

masyarakat Tanjungpinang dalam mengisi aktivitas keseharian mereka. Ini dibuktikan dengan rutinitas keberadaan mereka di kedai kopi yang dapat dikatakan setiap harinya. Atau ada juga masyarakat yang tidak setiap hari berkunjung di kedai kopi, namun dalam setiap minggunya mereka pasti ada berkunjung ke kedai kopi. Ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Hajarullah dan Bapak Ari Sibarani berikut.

Saya setiap pagi sebelum ke kantor pasti duduk sebentar di kedai kopi. Sekedar sarapan, membaca berita dan bersosialisasi dengan beberapa teman. (Bapak Hajarullah).

Saya termasuk jarang ke kedai kopi, karena aktivitas kerja saya lumayan menyita waktu. Tapi dalam seminggu saya pasti ada ke kedai kopi dua atau tiga kali. Kadang diajak kawan ngumpul atau dalam rangka menjamu tamu kantor yang datang dari luar kota. (Bapak Ari Sibarani)

Hal ini semakin menjelaskan bahwasanya *ngopi* sudah menjadi gaya hidup masyarakat di Kota Tanjungpinang. Meskipun mungkin seseorang kurang menyukai duduk di kedai kopi, namun ketika ada saudara, teman atau rekan kerja mengajak beraktivitas di kedai kopi, seseorang akan datang berkunjung ke kedai kopi. Biasanya memang masyarakat mengunjungi kedai kopi di pagi, sore dan malam hari, namun di luar waktu tersebut kedai kopi tetap memiliki pengunjungnya.

Bagi sebagian besar masyarakat Tanjungpinang, mengunjungi kedai kopi menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan keseharian mereka. Terutama bagi mereka yang setiap harinya berkunjung ke kedai kopi, mereka seakan mewajibkan pada dirinya untuk beraktivitas di kedai kopi di setiap harinya. Minat masyarakat Tanjungpinang terhadap

kedai kopi dalam kesehariannya ini mempertegas bahwa *ngopi* merupakan gaya hidup bagi masyarakat Tanjungpinang pada umumnya.

Pendapat atau opini masyarakat mengenai kedai kopi juga amat beragam, mulai dari tempat menikmati atau sekedar membeli aneka makanan dan minuman, tempat bersantai melepas lelah, tempat berkumpul, tempat menyelesaikan urusan yang tidak selesai di balik meja kantor, tempat kesepakatan bisnis hingga tempat untuk mencari hiburan. Ragam pandangan masyarakat mengenai kedai kopi tersebut menandakan bahwa masyarakat Tanjungpinang memiliki pandangannya masing-masing dalam hal memanfaatkan keberadaan kedai kopi. Pendapat-pendapat yang beragam tersebut menegaskan bahwa kedai kopi menjadi pertimbangan setiap orang untuk menjalani aktivitas sehari-hari di kedai kopi sebagai gaya hidup mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan sebelumnya, pada bagian akhir penulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Tanjungpinang pada umumnya melakukan aktivitas di kedai kopi dalam kesehariannya. Terdapat beragam aktivitas yang dilakukan masyarakat Tanjungpinang di kedai kopi. Mulai dari aktivitas konsumsi, aktivitas aktivitas sosial, aktivitas kerja, aktivitas bisnis, aktivitas belajar dan aktivitas hiburan. Beragam latar belakang dan aktivitas pengunjung di kedai kopi semakin menguatkan peranan kedai kopi sebagai ruang publik bagi masyarakat. Hadirnya kedai kopi sebagai ruang publik bagi masyarakat Tanjungpinang secara pasti menimbulkan

kenyamanan bagi masyarakat berada di kedai kopi. Kenyamanan tersebut menggiring opini masyarakat mengenai kedai kopi dan menjadikan kedai kopi sebagai tempat yang diminati atau dianggap penting dalam menjalani aktivitas keseharian masyarakat. Hal inilah yang menjadikan aktivitas di kedai kopi (*ngopi*) sebagai suatu gaya hidup bagi masyarakat kota Tanjungpinang.

Daftar Pustaka

- Amirullah, *Perilaku Konsumen*. Graha Ilmu : Jakarta. 2002
- Bungin. Burhan, *Sosiologi komunikasi "Teori, Paradigma & Diskursus Teknologi komunikasi di Masyarakat"*. Kencana : Jakarta. 2006.
- Dewi Wulansari, *Sosiologi: Konsep dan Teori*, PT. Rafika Aditama : Bandung. 2009.
- F. Budi Hardiman, *Ruang Publik : Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*
- Hanasse Malo dan M. Iqbal Djajadi, *Metode penelitian sosial*
- Hurriyati. R, *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*. Alfabeta : Bandung. 2005
- Martono. Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Rajawali Pers : Jakarta. 2012
- Narwoko. D. BagongSuyatno, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana : Jakarta. 2007
- Panggabean. E, *Buku Pintar Kopi*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. 2010
- Saputra, E, *Kopi : dari sejarah, Efek bagi kesehatan tubuh dan gaya hidup*. Grafindo : Yogyakarta. 2008
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2006.

Jurnal dan Skripsi

- Firmansyah. EO, *Pemanfaatan Warung Kopi Sebagai Ruang Publik di Kota Banda Aceh*. Skripsi Universitas Gajah Mada : Yogyakarta. 2014
- Khoironi, Fidagta. *"Ekspresi Keberagaman Komunitas Warung Kopi : Analisis Profil Komunitas Warung Kopi Blandongan di*

Yogyakarta" Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Reza Dwiyan Nurazizi, *Kedai Kopi dan Gaya Hidup Konsumen (Analisis Simulacrum Jean P Baudrillard Tentang Gaya Hidup Ngopi di Excelso)*. Jurnal penelitian ilmiah jurusan Sosiologi Fisip Universitas Brawijaya : Malang. 2013

Rosul, *Menikmati Kopi Sampai Mati: Studi Sosiologi Atas Pergeseran Pola Konsumsi Kopi di Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2010

Zulfahri Huraera, *Fenomena warung kopi*. Skripsi. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo. 2015

Sumber Lainnya

Marta Mahardika, *Fenomena Warung Kopi Dan Malnutrisi*, dalam situs internet <http://www.warungmassahar.blogspot.com>

Muhammad Arkan, *Ngopi Kopi Cethe Sambil Nyethe Rokok*, dalam situs internet <http://www.blog.binder724studio.com>

Muhyiddin, *Komunitas Warung Kopi (KWK) Sebagai Sub-Kultur*, dalam situs internet <http://www.yogyes.com/id/Jogjakarta-tourism-article/coffee-shop-in-Jogjakarta>

REFORMASI PERATURAN AGRARIA DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI

Rindi Afriadi

Mahasiswa Program Studi Sosiologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Terbatasnya ketersediaan tanah mengakibatkan bonus demografi mengalami kendala karena usia produktif yang melimpah hanya dapat memenuhi tanah dalam ruang yang terbatas. Reformasi agraria menjadi solusi yang diberikan pemerintah, dimana tanah terlantar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk program pertanian maupun non pertanian. Eratnya keterkaitan lahan dengan kegiatan pertanian menyebabkan upaya perbaikan kesejahteraan petani tidak cukup hanya melalui perubahan teknologi dan kelembagaan yang terkait dengan proses produksi, perbaikan akses petani terhadap lahan akan banyak menentukan keberhasilan upaya perbaikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Lahan pertanian yang cenderung makin terbatas karena harus berkompetisi untuk berbagai penggunaan, sementara orang yang bekerja di pertanian secara absolut terus bertambah sehingga menyebabkan rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan semakin sempit. Kondisi ini merupakan akibat dari akumulasi kesalahan di dalam penerapan kebijaksanaan pembangunan yang kurang berpihak pada pertanian, dengan dikeluarkannya berbagai undang-undang dan peraturan yang memudahkan investor untuk mendapatkan lahan, salah satunya lahan pertanian. Upaya reformasi agraria, dengan sasaran memperbaiki akses petani terhadap lahan, perlu diawali dengan mereformasi berbagai peraturan/perundangan yang ada. Dalam bentuk membatasi investasi jika berhubungan dengan lahan pertanian masyarakat Indonesia, membentuk kebijakan untuk tanah kosong yang bergitu lama, dan dukungan pemerintah dalam peminjaman modal untuk produksi para petani.

Kata Kunci: Agraria, Reformasi Peraturan, Bonus Demografi.

Pendahuluan

Menyimak pernyataan Haryono Suyono, mantan Menko Kesra dan Ketua Yayasan Damandiri dalam dialog interaktif di Radio D-FM Jakarta, menyambut Konferensi Tingkat Tinggi tentang Kependudukan dan Pembangunan di New York, Amerika Serikat, 12-14 Oktober 2009, yang menyatakan, bonus demografi yaitu melimpahnya jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai sekitar 60 persen atau mencapai 160-180 juta jiwa pada 2020, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030. Bonus demografi, sebut

Haryono, suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan. Menyimak pernyataan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Oleh karena itu, bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia, dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi SDM-nya melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi.¹

Akan tetapi ada pertanyaan krusialnya dari sisi ekonomi untuk negara Indonesia yaitu

bagaimana memanfaatkan penduduk produktif yang banyak ini. Jika kondisi agraria sebagai salah satu penyedia lapangan kerja untuk penduduk Indonesia berkurang bahkan sudah tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Maka, jika penduduk yang produktif ini tidak berkerja itu sama saja dengan penduduk non-produktif. Saat yang tepat sebenarnya bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang luas agar penduduk yang produktif ini tidak sia-sia. Selain itu, konsep bonus demografi adalah konsep makro pembangunan. Karena itu, untuk memanfaatkan bonus ini maka pengambil kebijakan perlu memikirkan tataran mikro yaitu individu penduduk pada usia produktif ini. Agraria atau tanah merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional sehingga memegang peranan strategis. Agraria atau Tanah adalah permukaan bumi di daratan maupun dibawah air, termasuk ruang diatas maupun dibawahnya dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang mempunyai batas-batas tertentu, baik batas alam, batas administrasi, maupun batas-batas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya, sebagai matriks utama ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem spasial kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, yang dikelola untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan, dalam harmoni sosial yang dinamis dan menjamin keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

BPN, 2007, *Penilaian Tanah Dalam Politik dan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*). Kebijakan umum penanganan bidang pertanahan tertera dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945,

yang menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Perkataan "dikuasai" oleh negara, yang dimaksud bukanlah berarti "dimiliki" negara, tetapi pengertiannya adalah memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi antara lain untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah, termasuk hak-hak yang dapat dimiliki masyarakat. Hubungan antara rakyat dengan bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat Abadi (pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang Undang Pokok Agraria). Menurut Anwar (1996:1) kelangkaan (scarcity) sumber daya tanah disebabkan karena persediaannya secara fisik terbatas. Masalah sumber daya tanah disebabkan oleh kebutuhan (needs) akan sumber daya tanah yang semakin meningkat, sedangkan potensi dan luas tanah yang tersedia terbatas. Peranan tanah menjadi begitu penting karena semakin kompleksnya aktivitas manusia sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pada permintaan tanah. Pembangunan yang terus meningkat membawa dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Sementara jumlah penduduk yang terus bertambah membawa konsekuensi semakin sulitnya untuk mendapatkan tanah untuk keperluan pembangunan dan pertanian.

Oleh karena itu dengan kondisi keterbatasan tanah di Indonesia penting pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi agraria dengan tujuan memikirkan tataran mikro yaitu individu penduduk pada usia produktif ini dan untuk menciptakan lapangan

kerja yang luas agar penduduk yang produktif ini tidak sia-sia dan menjadi penduduk non-produktif.

Dalam hal ini Reformasi Agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat 'baru' yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.²

Dalam dokumen "Petisi Cisarua" sejumlah pakar dan aktivis pembaruan agraria telah mengingatkan bahwa jika hendak menjalankan reforma agraria di Indonesia jangan lah "setengah-setengah", tetapi jadikan reforma agraria sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi (nasional) bagi Indonesia baru.³

Oleh sebab itu karena Indonesia akan menghadapi masa bonus demografi artinya orang yang bekerja di pertanian secara absolut terus bertambah harus berhadapan dengan kurangnya lahan pertanian yang ada di Indonesia. Kondisi ini merupakan akibat dari akumulasi kesalahan di dalam penerapan kebijaksanaan ekonomi pembangunan yang kurang berpihak pada pertanian, dengan tidak dibuatnya berbagai undang-undang dan peraturan yang tidak lagi memudahkan investor untuk mendapatkan lahan, termasuk lahan pertanian dan hak masyarakat dan tidak adanya peraturan yang mempermudah dan mendukung petani.

Upaya reformasi agraria, dengan sasaran memperbaiki akses petani terhadap lahan, perlu diawali dengan mereformasi berbagai peraturan/perundangan yang ada. Agar tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak berpihak kepada petani jika dilakukan reformasi agraria di Indonesia. Agar tidak adalagi kemudahan bagi investor untuk mendapatkan lahan petani yang seharusnya di dapatkan oleh petani. Agar upaya ini dapat terlaksana dibutuhkan political commitment dan pemerintah dan pihak legislatif tentang pentingnya reformasi peraturan sebelum dilakukan reformasi agraria untuk menghadapi bonus demografi.

Reformasi berbagai peraturan/perundangan yang kurang berpihak pada pertanian. Membuat undang-undang dan peraturan yang tidak memudahkan investor untuk mendapatkan lahan. Tantangan reformasi peraturan agraria untuk menghadapi bonus demografi Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah ingin melihat lebih lanjut betapa pentingnya Reformasi berbagai peraturan/perundangan yang kurang berpihak pada pertanian dan butuhkah political commitment dan pemerintah dan pihak legislatif tentang pentingnya Menghapus berbagai undang-undang dan peraturan yang memudahkan investor untuk mendapatkan lahan. Hal ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut karena pada saat sekarang banyak masalah-masalah yang membuat petani dirugikan dan agraria tidak menguntungkan petani.

Mereformasi Peraturan Agraria Sebagai Penyebab Konflik Agraria

1. Agraria

Menurut Budi Harsono dalam bukunya

yang berjudul Hukum Agraria Indonesia menyatakan, bahwa pengertian agraria dalam UUPA menganut arti luas yaitu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Batasan agraria dalam arti luas yang dianut dalam UUPA bermakna bahwa pengaturan/hukum mengenai agraria dan tidak hanya mengatur satu bidang hukum saja, tapi merupakan kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masingnya berkaitan dengan penguasaan Sumber Daya Alam. Diantaranya mencakup tanah, kehutanan, perkebunan, air dan sumber daya alam lainnya.⁴ Agraria merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional sehingga memegang peranan strategis. Ditengah euforia tentang reformasi akhir-akhir ini ungkapan tentang reformasi agraria semakin hari semakin banyak dikumandangkan berbagai pihak. Dalam berbagai pertemuan yang menyangkut tanah, rasanya tidak lengkap bila reformasi agraria tidak dibahas minimal disinggung. Walaupun demikian batasan tentang reformasi agraria itu sendiri belum secara jelas didefinisikan. Malahan untuk istilah saja ada perbedaan penyebutan, Tjondronegoro (1999) dan Bachriadi (1999) menyebutnya Pembaruan Agraria, sementara itu Putera (1999) menyebut Reforma Agraria dan Nasoetion (1999) menulisnya Transformasi Agraria. Mereka juga tidak secara eksplisit mengungkapkan batasan tentang Reformasi Agraria atau Pembaruan Agraria. Wiradi (2000) mengungkapkan istilah reformasi agraria berasal dari bahasa Spanyol yang dalam bahasa Inggrisnya disebut agrarian reform, dan dalam pengertian itu agraria reform adalah landreform plus. Artinya reformasi agraria adalah landreform yang disertai dengan program-program penunjangnya, termasuk program

pasca reformasi. Secara sederhana hakikat dari reformasi agraria adalah menata kembali struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan batasan seperti di atas, pengertian reformasi agraria jauh lebih luas dari landreform. Dalam tulisan ini batasan tentang reformasi agraria adalah perubahan yang mendasar dalam pengaturan pola hubungan masyarakat dengan lahan, yang memungkinkan terjadinya perbaikan struktur agraria di masyarakat. Pengertian agraria di sini tidak hanya berarti lahan, tetapi termasuk semua yang ada di atasnya Reformasi Agraria dilaksanakan agar terwujud dalam bentuk penguasaan dan pengelolaan atas Sumber Daya Alam.

Karena sumber Daya Alam memiliki peranan strategis bagi kehidupan manusia karena manfaat ekonomi yang dikandungnya. Berdasarkan penfasiran umum, bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis umumnya jumlah ketersediaannya akan terbatas. Sama halnya dengan Sumber Daya Alam/SDA. Pada saat Sumber Daya Alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mengelolanya untuk mendapatkan uang/memenuhi kebutuhan ekonomi, maka resiko-resiko timbulnya persaingan akan semakin besar. Setiap orang akan berusaha menguasai dan memanfaatkannya, apalagi jumlahnya terbatas. kecendrungan mereka akan bersaing untuk mendapatkannya.

Dari masalah ini maka akan dapat menimbulkan pertentangan. Saling klaim mengklaim diantara mereka. Dan pada saat masalah ini sudah masuk ke tataran sosial yang luas maka akan menimbulkan konflik. Atau yang

lebih dikenal dengan istilah konflik agraria.

2. Konflik Agraria

Penafsiran tersebut di atas, senada dengan apa yang menjadi buah pemikiran Gunawan Wiradi. Ia berpendapat bahwa, semua jenis konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian/ kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah SDA. Dalam memahami konflik agraria ia menawarkan bahwa kunci utamanya adalah kesadaran kita bahwa tanah/SDA merupakan hal yang vital yang melandasi semua aspek kehidupan manusia. dalam pandangannya secara komprehensif mengenai konflik agraria.⁵

Ia juga mencoba meng-indentifikasikan bahwa ada beberapa bentuk kesenjangan diantaranya; kesenjangan dalam penguasaan, konsep penguasaan, hukum dan kebijakan yang saling bertentangan. Bila kita merunut pada identifikasi timbulnya konflik karena adanya kesenjangan penguasaan/pemanfaatan akibat adanya kebijakan/hukum yang diskriminatif dalam mengatur hubungan-hubungan penguasaan dan pengelolaan SDA. Maka identifikasi ini sangat relevan bila kita kaitkan pada penyebab maraknya berbagai konflik agraria yang banyak terjadi di Indonesia. Menurut Usep Setiawan, aktivis KPA menyatakan bahwa lahirnya konflik sosial dibidang kehutanan/SDA, lebih disebabkan salah urus dalam pelaksanaan kebijakan, dan ketimpangan akibat adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah, dan kekayaan alam lainnya. Pada hakikatnya konflik agraria mencerminkan keadaan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi kelompok masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari tanah dan kekayaan alam kaum tani pada umum-nya. Ketidak adilan ini muncul sebagai

akibat adanya penerapan konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam yang salah.

3. Teori Konflik

Berbicara mengenai penyebab munculnya konflik karena adanya bentuk-bentuk perlawanan rakyat sebagai akibat adanya kondisi ekslusi. Identifikasi akar masalah ini, sama halnya bila kita merunut pendapat tokoh sosialis Karl Mark. Menurut teori Marxis, bahwa, konflik agraria terjadi akibat perkembangan ekonomi kapitalis, yang mengakibatkan penduduk terlempar dari tanahnya. Konflik agraria dilihat sebagai perlawanan penduduk yang tidak punya tanah, atau tanahnya yang dirampas oleh kapitalis/mereka yang mempunyai modal

Teori konflik Kral Mark merupakan teori yang mulanya diperkenalkan pada perhatiannya terhadap masalah-masalah perbedaan kelas sosial yang saat itu berkembang di perancis. Perbedaan kelas tersebut, menciptakan adanya kelompok masyarakat Borjuis dan Proletar. Masyarakat Borjuis merupakan kelas masyarakat pemilik modal, mereka mempunyai kekuasaan dan kekuatan uang, memilik ilmu dan keahlian khusus, sementara masyarakat kelas proletar adalah mereka yang relatif minim memiliki sumber-sumber daya modal, unskill dan banyak sebagai pekerja miskin. Kehidupannya bergantung pada sumber-sumber penghidupan yang disediakan/diberikan dari masyarakat borjuis/pemilik modal.

Dengan demikian kelas masyarakat borjuis, merupakan kelas masyarakat yang kuat dan di negara indonesia kelas borjuis di bantu dan di dukung oleh pemerintah indonesia sendiri dengan membuat peraturan yang memudahkan

kaum borjuis untuk mendapatkan lahan dengan dalih pembangunan negara dan kemakmuran bangsa. Sementara kelas proletar merupakan kelas masyarakat yang lemah di Indonesia adalah para petani-petani di Indonesia sering terjadi perebutan lahan dan timbul konflik berkepanjangan dan selanjutnya eksploitasi kelas borjuis terhadap kelas proletar.

Semakin lama gap/kesenjangan antara kelas masyarakat borjuis dengan masyarakat proletar semakin lebar. Kesenjangan yang diakibatkan dari bantuan pemerintah terhadap kegiatan pengambilan lahan oleh kelas borjuis akibat berbagai tersebut mendorong kesadaran dari kelas masyarakat proletar, yang memang selama ini berada di bawah kelas borjuis, melakukan pembontakan yang lebih dikenal sebuah gerakan sosial (revolusi), masyarakat kelas proletar mengharapkan bahwa dari gerakan ini akan mendapatkan kesetaraan dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Dan mengakhiri kesenjangan dan praktik-praktik eksploitasi terhadap diri mereka. Kemudian dari proses perjuangan tersebut maka muncullah apa yang dikatakan konflik. Konflik yang lebih disebabkan, karena adanya ketimpangan akses untuk memperoleh/menguasai sumber-sumber ekonomi.

Pemikiran tentang perlunya upaya perbaikan struktur pemilikan lahan di masyarakat sudah berkembang, jauh sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dicanangkan pada tahun 1960. Menurut Tjondro-negoro, para pemikir negara ini setelah masa kemerdekaan telah menyadari pentingnya memperbaiki struktur pemilikan lahan di masyarakat, selain berkaitan dengan hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, upaya

ini merupakan dasar untuk mengubah struktur ekonomi agraris dan menyelesaikan masalah-masalah agraria di Indonesia.

Untuk mencapai itu, hanya mungkin bila pertanian sudah menjadi basis ekonomi yang kuat, masalahnya sekarang apa yang dicanangkan para pemikir ini tidak secara konsisten dijalankan oleh pelaksana dan perencana pembangunan sesudahnya. Pada awal pemerintahan Orde Baru sampai dengan tahun 1974, pemerintah Orde Baru masih konsisten dengan semangat untuk memperkuat sektor pertanian di pedesaan, dan sayangnya upaya ini tidak disertai dengan perbaikan struktur keagrariaan di masyarakat.

Malahan sejak tahun 1975 terjadi perubahan yang mendasar dalam kebijakan pembangunan di Indonesia, dengan lebih mengedepankan upaya pemacuan pertumbuhan. Hal itu terlihat dengan dikeluarkannya Permendagri No. 15/1975 tentang "Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah", yang pada intinya memberikan kemudahan kepada investor dalam memperoleh lahan. Berawal dari kebijakan ini dan kebijakan lain yang senada sesudahnya, mulailah era dimana lahan menjadi komoditi yang mudah untuk di beli dan dikuasai investor. Secara umum kebijakan ini menyebabkan tiga hal, yaitu: (1) Makin rentannya lahan pertanian dan lahan ulayat milik masyarakat adat berpindah tangan pada investor dalam berbagai bidang usaha, (2) Maraknya sengketa lahan secara vertikal dan horizontal, (3) Berkembangnya penguasaan lahan untuk kegiatan spekulasi.

Konflik berkaitan dengan lahan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia, menurut Bachriadi (1999) selama tahun 1978-1999 terjadi 1.679 kasus sengketa lahan yang melibatkan 227.316 kepala keluarga. Sengketa lahan ini cenderung merugikan petani pemilik lahan atas masyarakat kecil, karena dari penyelesaian yang dilakukan hanya 4,3 persen yang dimenangkan rakyat kecil. Akibat akumulasi berbagai persoalan sekitar lahan selama ini, radikalisme petani cenderung bergerak ke puncak dan berpotensi untuk eksplosif. Konflik yang terjadi umumnya karena pengambilalihan lahan pertanian atau lahan hak milik masyarakat oleh investor. Dalam proses pengambilalihan ini seringkali lahan milik masyarakat dihargai sangat rendah, dan ini terkait juga dengan persoalan rent dari lahan. Menurut Nasoetion dan Winoto (1996), bila diserahkan pada mekanisme pasar maka nilai lahan yang dihitung dari nilai land rent-nya, hanya 1/500 dan 1/622 dari penggunaan untuk industri dan perumahan. Ini berarti bila tidak ada perlindungan dan hanya mengandalkan pada ekonomi pasar, maka lahan pertanian rentan sekali terhadap alih fungsi kepada penggunaan lain. Hasil penelitian PATANAS (2000) seperti yang dikutip Prakoso (2000) mengungkapkan bahwa di Jawa sekitar 88,0 persen rumah tangga petani menguasai lahan sawah kurang dari 0,50 hektar, dan sekitar 76,0 persen menguasai lahan sawah kurang dari 0,25 hektar.

4. Reformasi Peraturan Agraria

Pentingnya mereformasi Peraturan Yang Telah Menyebabkan Konflik Agraria sebelum pelaksanaan reformasi agraria. Wiradi (2000), secara umum menyebutkan bahwa untuk terlaksananya reformasi agraria diperlukan:

- (a) Kemauan politik dari pemerintah;
- (b) Data yang lengkap dan teliti mengenai keagrariaan;
- (c) Organisasi rakyat/tani yang kuat; dan
- (d) Elit penguasa/birokrasi yang terpisah dari elit bisnis.

Keempat hal di atas merupakan syarat keharusan bagi terlaksananya suatu reformasi agraria dan ditambah dengan suatu syarat kecukupan yaitu: adanya suatu lembaga khusus yang menangani masalah ini, menurut Wiradi (2000) semacam Badan Otorita. Pengalaman dari negara-negara yang berhasil melaksanakan reformasi agraria ternyata pengelolaannya ditangani oleh suatu badan khusus. Selain hal-hal di atas secara teknis, pelaksanaan reformasi agraria perlu didukung oleh:

- (a) Adanya tenaga pelaksana yang jujur,
- (b) Tersedianya data penguasaan dan pemilikan lahan yang lengkap, serta
- (c) Dukungan dana yang terus-menerus.

Menurut Silalahi (2000), keberhasilan Jepang dalam melaksanakan reformasi agraria didukung oleh semua hal di atas. Sementara itu di banyak negara lain terutama Amerika Latin, reformasi agraria tidak berhasil dilaksanakan karena tidak konsistennya dukungan pemerintah, dana yang tersedia tidak jelas serta data/peta penguasaan/pemilikan lahan yang tidak lengkap, disamping besarnya tantangan dari para tuan tanah. Reformasi agraria dari awal perlu juga dilakukan reformasi peraturan agar tidak ada lagi terjadi konflik sebab gap/kesenjangan antara kelas masyarakat borjuis dengan masyarakat proletar semakin lebar. Kesenjangan yang diakibatkan dari bantuan pemerintah terhadap kegiatan pengambilan lahan oleh kelas borjuis akibat berbagai tersebut mendorong kesadaran dari

kelas masyarakat proletar, yang memang selama ini berada di bawah kelas borjuis, melakukan pembontakan yang lebih dikenal sebuah gerakan sosial (revolusi), masyarakat kelas proletar mengharapkan bahwa dari gerakan ini akan mendapatkan kesetaraan dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Serta mengakhiri kesenjangan dan praktik-praktik eksploitasi terhadap diri mereka. Kemudian dari proses perjuangan tersebut maka muncul lah apa yang dikatakan konflik. Konflik yang lebih disebabkan, karena adanya ketimpangan akses untuk memperoleh/menguasai sumber-sumber ekonomi. Selanjutnya untuk memulai reformasi peraturan agar tidak ada lagi peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan kepada investor dalam memperoleh lahan berawal dari kebijakan ini dan kebijakan lain yang senada sesudahnya, mulailah era dimana lahan menjadi komoditi yang mudah untuk di beli dan dikuasai investor sehingga menyusahkan petani dan menimbulkan masalah pertanian maka pemerintah harus segera me-reformasi peraturan dengan cara.

Pertama, dengan membentuk peraturan yang menutup keran investasi atau membatasi investasi dari ivistor jika berkaitan dengan lahar peratanian masyarakat.

Kedua, pemerintah harus membuat peraturan terkait kebijakan untuk tanah kosong selama sepuluh tahun, artinya jika tanah kosong selama sepuluh tahun maka tanah itu harus di ambil alih oleh negara dan negara wajib memberikan kepada orang yang mampu mengelolah sehingga membantu pertumbuhan perekonomian negara.

Ketiga, pemerintah harus mendukung peminjaman modal untuk produksi para petani, sehingga tidak terjadi kesulitan dalam proses produksi.

Daftar Pustaka

- Adhitama, Toeti Prahastika. 2012. "Memaknai Bonus Demografi", Media Indonesia, 20 Juli, hlm.9
- Anwar, Effendi.1996. Bahan Kuliah Ekonomi Sumber Daya Lahan. Program Studi PPW. Bogor : Program Pascasarjana, IPB. Artikel "*Publik Administration in the 21-st Century*", diterbitkan oleh Asian Development Bank
- Reksohadiprodjo dan Pradono. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi* edisi 2. Yogyakarta: BPF.
- Afrizal . 2006.*Sosiologi Konflik Agraria Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Andalas University Press Padang.
- Alting Husen. *Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara Rakyat Versus Penguasaan dan Pengusaha*. Jurnal dinamika Hukum. Vol 13 no. 2 Mei 2013
- Limbong Bernard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Pustaka Margaretha. Jakarta
- Sekilas Badan Pertanahan Nasional; <http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas> diakses 22 September 2017
- Selamatkan batu karut; http://www.portalkbr.com/berita/saga/2677282_5535.html diakses 23 September 2017.
- Tugas Pokok dan Fungsi, <http://www.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2013/04/Kepala-Dinas-Pertanian-dan-Kehutanan.jpg>; diakses 22 september 2017

PERJUANGAN KELOMPOK MINORITAS: STUDI GERAKAN WARIA DI TANAH MELAYU TANJUNGPINANG

Marisa Elsera, S.Sos, M.Si, Sri Wahyuni, M.Si
(marisaelsera@yahoo.com)

Program Studi Sosiologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Keberadaan waria (Wanita-Pria) di tanah Melayu menuai pro dan kontra. Norma, nilai dan agama yang dianut oleh masyarakat Melayu Kota Tanjungpinang membuat keberadaan waria di kota ini terkategori pada perilaku menyimpang. Alhasil, perlakuan yang diterima oleh para waria di Kota Tanjungpinang cenderung diskriminatif. Berangkat dari hal itulah maka waria di Kota Tanjungpinang berkeinginan untuk memperjuangkan hak mereka yakni mendapatkan pengakuan dari masyarakat akan identitas mereka sebagai waria. Perjuangan itu diawali dengan membentuk komunitas waria yang dikenal dengan Forum Komunikasi Rumpun Waria Sehati (FKRWS) Kota Tanjungpinang. Untuk itu dibutuhkan suatu analisa akademis melalui landasan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dimana yang diteliti adalah gambaran kehidupan dan tindakan manusia dalam interaksi sosialnya. Untuk mendapatkan data-data deskriptif (memaparkan, menuliskan, melaporkan) berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau informasi yang dapat membantu mengetahui bagaimana perjuangan kelompok minoritas: studi gerakan waria di Tanjungpinang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa teridentifikasi bentuk-bentuk perjuangan waria agar diakui dalam masyarakat Tanjungpinang meskipun mereka dalam kelompok minoritas. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan bergabung dalam FKRWS Kota Tanjungpinang, bergabung dengan kegiatan sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS, membuka usaha yang dimodali oleh pemerintah Kota Tanjungpinang, mengikuti perlombaan dalam bidang olahraga seperti voli dan senam di Kota Batam, serta terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti mengikuti perayaan kemerdekaan Indonesia, menggalang bantuan untuk Rohingya dan menggalang kegiatan donor darah. Kegiatan yang dilakukan oleh waria FKRWS adalah bentuk dari perwujudan eksistensi mereka sebagai kelompok minoritas di tanah Melayu.

Keyword: Waria, Perjuangan, Kelompok Minoritas, Tanjungpinang

Pendahuluan

Waria atau transsexual yaitu keinginan untuk hidup dan diterima sebagai anggota kelompok lawan jenis, biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan jenis kelamin anatomisnya dan menginginkan untuk membedah jenis kelamin serta menjalani terapi hormonal agar tubuhnya sepadan dengan jenis kelamin yang diinginkan.

Kemunculan waria (wanita-pria) sudah menggejala. Hampir disetiap daerah ditemukan

waria, tak terkecuali di Kota Tanjungpinang. Kendati Kota Tanjungpinang identik dengan tanah Melayu dimana menganut filosofi adat bersandikan syarak dan syarak bersandikan kitabullah, namun keberadaan waria tidak dapat ditepis. Beberapa titik di Kota Tanjungpinang digunakan sebagai tempat berkumpulnya kaum waria hampir setiap malam seperti Lapangan Pamedan, Tenis Ban dan Monumen Raja Haji Fisabilillah. Tidak hanya itu, para waria ini juga membentuk perkumpulan resmi yang disebut

Forum Komunikasi Rumpun Waria Sehati (FKRWS) Kota Tanjungpinang.

Peneliti mendapatkan fakta bahwa 1 orang pernah mengalami pemecatan dari pekerjaannya di salah satu hotel bintang 3 di Kota Tanjungpinang karena ketahuan sebagai waria. Akhirnya, waria tersebut memutuskan untuk melacurkan dirinya. Kondisi diskriminatif yang dialami oleh para waria tidak hanya sekali itu terjadi. Seringkali mereka dilecehkan oleh pengendara motor yang melintas di dekat mereka. Salah satu waria pernah disiram dengan air keras, beberapa orang lainnya dilempar dengan nasi bungkus yang sudah basi. Belum lagi ketika mereka harus pasrah diperlakukan semena-mena oleh aparat ketika terjaring razia.

Berangkat dari perlakuan diskriminatif tersebut, maka dibentuklah forum khusus waria. Dengan semangat kekeluargaan dan harapan untuk dapat diterima layaknya masyarakat heteroseksual dan berpenampilan konformiti, maka dibentuklah forum tersebut. Perkumpulan waria di Kota Tanjungpinang diawali pada tahun 1994 dengan berdirinya Himpunan Waria Bintang (HIWABIN). HIWABIN sebagai organisasi yang menaungi waria memiliki aktifitas pembinaan dan perlindungan terhadap hak-hak kaum waria. Organisasi ini tidak berlangsung lama, dikarenakan banyak anggota yang akhirnya pindah ke daerah lain akhirnya aktifitas organisasi ini vakum. Setelah HIWABIN tidak beraktifitas kembali kemudian muncul Forum Komunikasi Rumpun Waria Sehati Kota Tanjungpinang untuk mengayomi waria-waria yang ada di Kota Tanjungpinang.

Forum Komunikasi Rumpun Waria Sehati Kota Tanjungpinang sebagai perkumpulan yang didirikan atas dasar keprihatinan atas nasib

waria di Kota Tanjungpinang. Tujuannya adalah untuk melindungi waria-waria yang mengalami permasalahan. Namun kemudian FKRWS menjadi organisasi resmi yang berfungsi sebagai wadah bagi kaum waria guna meningkatkan peran waria dalam masyarakat dan perlindungan atas hak-hak waria. FKRWS tidak hanya sekedar melakukan pengayoman pada waria yang terkena masalah namun juga pemberdayaan bagi kaum waria supaya tidak terlantar di jalanan dan menjadi duta kesenian yang biasa menghibur warga Kota Tanjungpinang.

Menariknya, walaupun dinamika dan hubungan sosial masyarakat Tanjungpinang digali dan dibahas, namun isu-isu jender non-normatif atau nonheteroseksualitas di dalam masyarakat Melayu Tanjungpinang tidak pernah muncul ke permukaan. Padahal keberadaan kaum waria yang juga merupakan homoseksual dalam hal orientasi seks adalah nyata. Eksistensi mereka tampak jelas meskipun lingkungan sosial masih mendiskriminasi mereka. Berdasarkan uraian diatas, tentu menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana perjuangan kelompok minoritas Waria di Tanjungpinang?

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perjuangan kelompok minoritas Waria di Tanjungpinang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana yang diteliti adalah gambaran kehidupan dan tindakan manusia dalam interaksi sosialnya. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptive* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pembahasan

Perjuangan Waria di Tanjungpinang

Waria adalah bagian dari kehidupan sosial. Olong (2007) menyebutnya sebagai gender ketiga yang sudah ada seiring dengan berkembangnya budaya nusantara masa lampau. Masyarakat umum menyebut waria dengan istilah beragam seperti waria, banci, bencong, wanda dan wadam. Kemunculan waria sebagai dikotomi laki-laki dan perempuan. Sebagai kelompok rentan, sebenarnya keberadaan waria sudah dijamin dalam UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (3) UU tersebut berbunyi *Use the "Insert Citation" button to add citations to this document.* "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi" dan Pasal 5 ayat 3 menyatakan, "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya." Namun sekalipun UU NO 39/1999 menjadi dasar hukum yang kuat bagi waria untuk memperoleh perlakuan yang adil dari negara, kenyataan di lapangan selama ini waria belum diperlakukan sebagaimana warga negara „normal“ lainnya. Aksesibilitas terhadap pelayanan publik dasar belum diberikan oleh pemerintah Indonesia.

Kemunculan waria (wanita-pria) sudah menggejala di Tanjungpinang. Kendati Kota Tanjungpinang identik dengan Tanah Melayu dimana menganut filosofi adat bersandikan syarak dan syarak bersandikan kitabullah, namun keberadaan waria tidak dapat ditepis. Beberapa titik di Kota Tanjungpinang digunakan sebagai tempat berkumpulnya kaum waria hampir setiap malam seperti Lapangan

Pamedan, Tenis Ban dan Monumen Raja Haji Fisabilillah.

Kendati keberadaan waria di Tanjungpinang dikategorikan dalam kelompok minoritas. Artinya, secara kuantitatif waria masih sedikit dibandingkan masyarakat "normal". Seperti halnya kaum minoritas lainnya, waria juga mengalami diskriminasi, eksploitasi, ketidakadilan serta ketidaksetaraan. Padahal, setiap individu dijamin kebebasannya untuk melanjutkan hidup yang berbeda tanpa ada intervensi. Setiap individu bebas membentuk atau bergabung dalam berbagai perkumpulan dan mencari anggota baru bagi perkumpulan itu dalam "ajang kebudayaan". Atas pandangan itu, memberikan pengakuan politik atau dukungan pada perhimpunan budaya tertentu adalah tidak perlu karena suatu cara hidup yang berharga tidak mempunyai kesulitan dalam menarik pengikut.

Meskipun Kota Tanjungpinang adalah kota yang multietnis dan masyarakatnya terbilang mampu bertoleransi antaretnis, namun ruang toleransi itu ternyata belum bisa terbuka sepenuhnya bagi subkultur menyimpang seperti waria. Nyatanya keberadaan waria di Tanjungpinang masih mengalami diskriminasi dan ketidaksetaraan. Oleh sebab itu, tak mengherankan ketika waria di Tanjungpinang berupaya untuk dapat diterima dan terintegrasi dengan masyarakat mayoritas.

Pemerintah kota Tanjungpinang dan masyarakat pada umumnya mengidentifikasi waria sebagai jenis kelaminnya ketimbang gendernya. Hal ini pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya diskriminasi terhadap waria untuk memperoleh pelayanan publik dasar sebagaimana dialami waria di Kota

Tanjungpinang. Para informan pernah mengaku mengalami kesulitan diterima sebagai siswa di lembaga pendidikan formal, bekerja sebagai karyawan swasta (sampai dipecat).

Diskriminasi yang diterima oleh waria di tanah Melayu ini disebabkan oleh defisini penyimpangan statistical, yakni penyimpangan yang didasarkan pada perilaku atau tindakan yang bertolak dari rata-rata atau perilaku yang bukan rata-rata. Pendekatan ini berasumsi bahwa sebagian besar masyarakat dianggap melakukan cara-cara yang "benar". Oleh sebab itu pihak minoritas yang melakukan cara-cara diluar dari "kebenaran" mayoritas dianggap menyimpang. Hal inilah yang dialami waria sebagai pihak minoritas di tanah Melayu Tanjungpinang. Sebagai kelompok yang secara statistical paling sedikit dibandingkan masyarakat heteroseksual, perilaku waria dianggap menyimpang dan perlu diberikan *punishment* terhadap perbuatan dan pilihan hidupnya.

Punishment yang diberikan oleh masyarakat Tanjungpinang terhadap waria seperti yang diakui oleh para informan seperti; dilecehkan secara verbal saat ingin memanfaatkan sarana dan prasarana publik. Informan mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual secara verbal dan fisik khususnya waria yang berprofesi sebagai pelacur jalanan, mereka pernah dilempari sampah hingga air keras ketika berdiri di jalan. Berangkat dari pengalaman buruk itu, maka waria di Tanjungpinang berupaya melakukan aktivitas sosial yang bertujuan untuk mempertunjukkan eksistensi dan kepedulian mereka pada isu sosial yang berkembang di masyarakat.

Tuntutan agar diterimanya subkultur menyimpang pada masyarakat Tanjungpinang menjadi tantangan tersendiri. Perjuangan waria sebagai kelompok minoritas untuk mendapatkan pengakuan atas identitas mereka dari kelompok mayoritas membutuhkan usaha yang lebih besar. Pihak mayoritas menuduhkan bahwa akan terjadi gap atau pengkotakkan yang dapat mengganggu integrasi mayoritas dan minoritas. Tuduhan itu agak berlebihan apalagi jika terjadi pengabaian atas motivasi kelompok minoritas. Tuduhan yang seperti itu juga dialami oleh waria sebagai kelompok minoritas di Kota Tanjungpinang.

Kelompok waria yang ada di Tanjungpinang memiliki keinginan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih besar dan dapat diterima sebagai anggota penuh masyarakat tersebut. Mereka kemudian mencari pengakuan yang lebih besar atas identitas kelompok mereka, bukan untuk menjadi terpisah melainkan untuk mendapatkan penerimaan atas perbedaan mereka. Oleh sebab itulah mereka membentuk kelompok minoritas untuk mempertegas identitas dan aspirasi mereka yang diwujudkan dalam Forum Komunikasi Rumpun Waria Sehati (FKRWS). Berikut ini identifikasi peneliti terhadap gerakan waria yang ada di Tanjungpinang:

Membentuk Asosiasi Rumpun Waria Sehati Tanjungpinang

Diskriminasi terhadap waria sebagai kelompok minoritas di Tanjungpinang terutama dalam mendapatkan pelayanan publik dasar yang dialami waria dapat ditelusuri akar penyebabnya dari faktor kultur dan struktur masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai budaya patriarki. Kondisi fisik dan gender waria

yang menyimpang dari nilai sosial budaya maupun religi menjadi justifikasi untuk menutup akses waria dalam mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban publik. Dikotomi manusia menjadi dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan dua jenis identitas gender (maskulin dan feminin) menyebabkan waria yang berjenis kelamin laki-laki tapi berjiwa dan naluri feminin tidak masuk ke dalam kategori manusia normal

Ruth Benedict (dalam Dananjaja, 2003) berpendapat bahwa tidak ada kriteria yang sah (valid) mengenai tipe kepribadian "normal" dan "abnormal". Suatu kepribadian dianggap normal apabila sesuai dengan tipe kepribadian yang dominan, sedangkan tipe kepribadian yang sama, apabila tidak sesuai dengan tipe kepribadian dominan akan dianggap "abnormal" atau menyimpang (*deviant*). Pengkategorian "normal" dan "abnormal" merupakan upaya standarisasi nilai (Lukmantoro, 2006). Penetapan standar ini diraih dengan cara dominasi (kekerasan fisik) maupun hegemoni (persetujuan dengan dalih moral maupun intelektual). Standarisasi tidak pernah terlepas dari upaya pelembagaan atau institusionalisasi yang merujuk pada nilai-nilai yang dianggap memenuhi kualifikasi normalitas dari kepentingan gender, agama, kelas, dan juga etnisitas tertentu. Standarisasi tidak akan terbebas dari stigmatisasi. Padahal stigmatisasi tidak sekedar upaya memberi label, dalam proses stigmatisasi ada mekanisme inklusi dan eksklusivitas yang berarti terdapat pihak yang layak dianggap benar serta pada saat sama terdapat pihak lain yang pantas dikucilkan dan disingkirkan. Apabila standarisasi nilai itu dilegalkan dalam bentuk hukum atau undang-

undang, maka yang terjadi adalah negara mempunyai pembenaran menghukum pihak lain yang dianggap abnormal, tidak konvensional, serta tersingkirkan. Dalam hal ini, diskriminasi Negara terhadap waria bisa dipahami sebagai bentuk eksklusivitas atau penyingkiran waria dari akses layanan publik dasar. Tindakan ini dibenarkan karena waria yang berperilaku feminin dan mempunyai preferensi seksual pada sesama jenis ditetapkan sebagai cacat sosial atau patologi sosial yang pantas dikucilkan atau disingkirkan.

Guna melindungi diri dari diskriminasi publik serta untuk sharing informasi sesama waria maka waria di Tanjungpinang membentuk organisasi Forum Komunikasi Rumpun Waria Sehati. Sejarah berdirinya perkumpulan waria di Kota Tanjungpinang dimulai dari berdirinya Himpunan Waria Bintang (HIWABIN) pada tahun 2004, yang mana asosiasi yang memiliki aktivitas pembinaan dan perlindungan terhadap hak-hak kaum waria. Namun asosiasi ini tidak bertahan lama disebabkan masalah internal anggota komunitas ini. Ada banyak waria anggota komunitas ini yang pindah ke daerah lain sehingga kegiatan himpunan ini tidak berjalan.

Setelah bubarnya HIWABIN, waria di Kota Tanjungpinang kemudian membentuk Forum Komunikasi Rumpun Waria Sehati Kota Tanjungpinang. Tujuannya hampir sama dengan HIWABIN, yakni untuk mengayomi, membina dan melindungi hak-hak kaum waria yang ada di Kota Tanjungpinang.

Dewasa ini Forum Komunikasi Rumpun Waria Sehati (FKRWS) mulai melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi waria seperti melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap waria dengan memberikan bantuan

usaha, pelatihan di bidang seni. Tujuan utamanya adalah menanamkan kemandirian pada waria yang ada di Tanjungpinang. Selain kegiatan peningkatan ekonomi, FKRWS juga melakukan sosialisasi HIV/AIDS.

Peningkatan ekonomi bagi waria sebenarnya adalah upaya untuk menyasar waria-waria yang masih "mangkal" atau menjadi pekerja seks di Kota Tanjungpinang. Sebab, visi dari FKRWS adalah mencita-citakan komunitas dan individu waria yang mampu melakukan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap infeksi menular seksual dan HIV/AIDS dengan pendekatan kesehatan dan kesejahteraan seksual dari reproduksi serta hak asasi manusia.

Sementara itu, untuk mewujudkan visi FKRWS maka disusun misi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memobilisasi organisasi dan komunitas waria sehingga dapat melaksanakan program pencegahan, perawatan, dukungan serta pengobatan terhadap IMS, HIV dan AIDS dalam kerangka kesehatan, kesejahteraan serta hak seksual dan reproduksi.
2. Membangun, mengembangkan dan memelihara komunikasi dan kerja sama yang baik diantara organisasi dan komunitas waria maupun dengan lembaga lainnya yang berkepentingan untuk mencapai terpenuhinya kesehatan, kesejahteraan serta hak-hak waria sebagai warga negara Indonesia.
3. Mengkoordinasi kerja advokasi menuju tercapainya kesehatan dan kesejahteraan seksual termasuk IMS dan HIV dan AIDS yang optimal pada komunitas waria.

Berikut ini akan disampaikan data Waria di Kota Tanjungpinang berdasarkan usia:

Tabel 5.1
Data Waria di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Usia

No	Usia Waria	Jumlah
1	16-25 tahun	15 orang
2	26-35 tahun	19 orang
3	36-45 tahun	7 orang
4	46 tahun >	4 orang
	Total	45 orang

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Tanjungpinang 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa waria di Kota Tanjungpinang terdiri dari usia remaja hingga dewasa. Anggota paling banyak berusia 16-35 tahun, yakni lebih dari 70%. Jumlah anggota FKRWS

Tanjungpinang hingga 2017 adalah 45 orang. Selain data waria berdasarkan usia, peneliti juga mengumpulkan data waria berdasarkan pekerjaan tetap di Tanjungpinang, berikut datanya:

Tabel 5.2
Data Waria di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Pekerjaan Tetap

No	Pekerjaan Waria	Jumlah
1	Salon	26 orang
2	LSM HIV/AIDS	8 orang
3	PNS	1 orang
4	Swasta	10 orang
	Total	45 orang

Sumber: FKRWS Kota Tanjungpinang 2015

Sebagian besar waria di Kota Tanjungpinang bekerja sebagai hair styles dan make up artis. Bidang pekerjaan ini mendominasi karena salon tidak hanya sebagai tempat bekerja tapi basecamp waria dalam aktifitas sehari-hari. Meski sudah punya pekerjaan tetap, berdasarkan penelitian ini 60% waria di Kota Tanjungpinang bekerja sebagai pekerja seks. Mereka menjadi pekerja seks dengan cara "mangkal" di Lapangan Pamedan KM 4, sekitar LANTANAL dan Tennis Ban (belakang gedung daerah) pada malam hari yakni pukul 22.00-dini hari.

Terlibat dalam Kegiatan Sosial

Keberadaan waria di Tanjungpinang sebenarnya bertentangan dengan kolektivitas masyarakat di Tanjungpinang. Padahal, masyarakat kolektif itu direkatkan dan dihidupi oleh dominannya nilai-nilai kebersamaan, sementara masyarakat individualis lebih dihidupi oleh nilai-nilai otonomi pribadi dan kebebasan kreatif individu dimana diri dihargai karena keunikannya sebagai seorang pribadi. Hal terakhir inilah yang terjadi pada waria di Tanjungpinang, dimana mereka dihidupi oleh nilai-nilai otonomi pribadi yang bertentangan dengan nilai kebersamaan yang mempererat masyarakat kolektif. Menyadari hal tersebut, waria di Tanjungpinang berupaya untuk memperkenalkan diri dan mengupayakan agar keberadaan mereka dapat diterima oleh masyarakat Tanjungpinang meskipun terkadang secara performance dan pilihan hidup bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan. Cara yang dipilih waria dalam hal ini adalah dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial bersama masyarakat Tanjungpinang. Berikut kegiatan yang dilakukan waria FKRWS di

Tanjungpinang:

a. Terlibat dalam Pencegahan HIV/AIDS di Tanjungpinang

Para waria di Tanjungpinang yang tergabung dalam FKRWS aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti pencegahan HIV/AIDS di Tanjungpinang. Waria FKRWS mendukung kegiatan Support Grant For Operation ISEAN HIVOS Program GWL-INA pada Agustus 2017. Dengan adanya dukungan Dana Operasional dari GWL-INA ini, FK-RWS lebih mampu untuk meningkatkan program penanggulangan HIV dan AIDS terutama di kalangan Waria, meningkatkan pengetahuan tentang SOGIE, mendukung kualitas kesehatan seksual dan reproduksi serta mengurangi stigma dan diskriminasi di komunitas Waria di Kota Tanjungpinang.

Waria yang tergabung dalam FKRWS bekerjasama dengan petugas medis lapangan dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang melakukan *outreach* dengan mendatangi Hotspots-hotspot Waria dengan tujuan memberikan informasi kesehatan tentang HIV dan AIDS, IMS dan akses Layanan serta membagi-bagikan kondom dan pelicin ke teman-teman Waria.

Tergabungnya waria ke dalam kegiatan sosial dan kesehatan ini bertujuan untuk merangkul waria lainnya yang belum tergabung dalam komunitas untuk mengakses layanan kesehatan, menjadi agen sosialisasi yang memberikan informasi kesehatan tentang IMS, HIV dan AIDS serta berkoordinasi dengan Instansi pemerintah terkait penanggulangan HIV AIDS serta mencoba untuk mendapatkan bantuan nutrisi dan obat bagi waria yang

menjadi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Ada 8 orang waria di Kota Tanjungpinang yang bekerja sebagai aktivis dalam LSM HIV/AIDS. Mereka juga terlibat dalam kegiatan sosialisasi kondom khususnya kepada waria di Tanjungpinang yang menjajakan dirinya sebagai pekerja seks di Pamedan dan Tenis Ban.

b. Terlibat dalam Donasi untuk Muslim Rohingya

Waria di Tanjungpinang punya kepedulian yang besar dengan para pengungsi muslim Rohingya di Myanmar. Mereka menggalang donasi untuk muslim Rohingya. Ini adalah bentuk toleransi yang mereka ajarkan kepada masyarakat kolektif di Tanjungpinang. Mereka menyadari bagaimana rasanya menjadi pihak minoritas yang disingkirkan dari daerahnya. Diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi yang dialami oleh waria di Tanjungpinang sepertinya membuat mereka mampu merasakan kesulitan muslim Rohingya.

c. Terlibat dalam Kegiatan HUT RI

Para waria bersama masyarakat Tanjungpinang menggelar peringatan HUT RI. Mereka mengikuti perlombaan layaknya masyarakat pada umumnya dan juga memberikan hiburan berupa pertunjukan seni karena beberapa dari mereka mahir menyanyi dan menari.

Menyesuaikan Penampilan Selama Siang Hari

Guna membaaur dalam masyarakat mayoritas, waria di Tanjungpinang menyesuaikan penampilannya selama siang hari. Mereka berpakaian seperti laki-laki pada umumnya dan berupaya bertingkah laku seperti lelaki. Meski berpakaian seperti laki-laki di siang hari, kedirian mereka sebagai waria sebenarnya

tidak mampu ditutupi. *Gesture* tubuh yang gemulai, alis yang sudah disulam hingga raut muka yang tampak lebih terawat dan manis dibandingkan laki-laki biasa tetap tampak dari mereka. Sehingga, sangat gampang masyarakat untuk mengidentifikasi mereka sebagai waria. Terlebih lagi cara bicara mereka yang khas.

Berdasarkan cara atau upaya yang telah dilakukan oleh waria FKRWS Tanjungpinang seperti yang telah peneliti jelaskan diatas, dapat diidentifikasi bahwa ada pengabaian kenyataan bahwa para anggota dari suatu kelompok minoritas menghadapi kerugian yang tidak dihadapi oleh anggota dari kelompok mayoritas.

Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan

Dewasa ini hampir semua ahli dari banyak Negara setuju bahwa perlu diberikan dukungan bagi sejumlah besar hak atas minoritas. Namun, tidak ada rumus yang sederhana untuk memutuskan secara tepat hak mana dan diberikan pada kelompok minoritas mana. Sebab, tidak semua ahli sepakat bahwa semua kelompok adalah pihak minoritas yang punya kerentanan terutama dalam pembangunan. Padahal keadilan pembangunan adalah keadilan dalam prosedur pengambilan keputusan seperti mempertimbangkan kepentingan dan perspektif dari minoritas. Seringkali pihak minoritas tidak memiliki keterwakilan dalam pembangunan, apalagi pembangunan di daerah kepulauan. Kelompok rentan seperti waria, perempuan, orang-orang cacat dan masyarakat miskin juga secara signifikan tidak terwakili.

Misalnya, kesulitannya waria mengakses pelayanan publik di daerah kepulauan. Mereka seringkali dipertanyakan tentang identitasnya, terutama jenis kelaminnya. Padahal, waria

bukanlah mengenai jenis kelamin tapi tentang gendernya. Perspektif inilah yang perlu diketahui oleh pemerintah Kota Tanjungpinang. Sehingga, dalam pelaksanaan administrasi publik, para waria tidak lagi mendapatkan diskriminasi seperti pengalaman mereka sebelumnya yakni mengalami kesulitan diterima sebagai siswa di lembaga pendidikan formal, bekerja sebagai karyawan swasta (sampai dipecat).

Para waria perlu dilirik dalam merancang pembangunan di daerah kepulauan ini, sebab kelompok waria yang awalnya bukanlah kelompok minoritas bermasalah dan rentan namun jika diabaikan dan terus mendapatkan diskriminasi (terutama dalam pelayanan publik), maka kelompok ini dapat berubah sebagai kelompok/ subkultur menyimpang yang tidak lagi terkategori sebagai kelompok minoritas yang didefinisikan penyimpangan statistical, tapi bisa berubah jadi absolut (mutlak). Kelompok waria bisa saja seperti teori broken window (jendela pecah) yang jika dibiarkan dan terus terabaikan maka akan membuat persoalan/masalah baru dikemudian harinya.

Perlunya melibatkan waria dalam pembangunan karena mereka adalah kelompok rentan, maksudnya mereka rentan untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif dan mereka juga rentan terhadap penyakit infeksi menular (dengan catatan jika melakukan hubungan seksual tidak sehat; sebenarnya hal ini juga tidak pengecualian bagi masyarakat normal). Oleh sebab itu, mereka perlu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti sosialisasi pencegahan HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba dan berhubungan seks yang aman. Perlu pendekatan khusus yang dilakukan kepada kelompok waria, sebab jika pendekatan

dilakukan dengan perspektif masyarakat mayoritas (yang mana menilai waria sebagai kelompok orang-orang sakit), maka tentu pendekatan ini tidak akan dapat dilakukan. Namun, pendekatan yang dilakukan adalah dengan memperlakukan mereka sama halnya dengan masyarakat biasa (terutama dalam interaksi sosial) dirasa dapat merangkul mereka.

Selain kegiatan sosial, waria juga perlu diarahkan untuk mandiri dan berdaya. Sebab, jika waria mandiri dan berdaya maka mereka bukan saja bisa memenuhi kebutuhan dengan cara konformiti, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Hal ini akan menekan angka waria yang menjadi pekerja seksual. Sebab, menurut penelitian ini kami menemukan alasan waria menjadi pekerja seksual di Tanjungpinang adalah karena kurangnya skill, kepercayaan masyarakat (trust), sulitnya mencari pekerjaan yang dapat menerima mereka apa adanya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Perjuangan Kelompok Minoritas: Studi Gerakan Waria di Kota Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa perjuangan waria untuk mendapatkan pengakuan dan dapat diterima oleh masyarakat Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Asosiasi Rumpun Waria Sehati Tanjungpinang
2. Terlibat dalam Kegiatan Sosial, seperti:
 - a. Terlibat dalam Pencegahan HIV/AIDS di Tanjungpinang
 - b. Terlibat dalam Donasi untuk Muslim Rohingya
 - c. Terlibat dalam Kegiatan HUT RI
3. Menyesuaikan Penampilan Selama Siang Hari

Daftar Pustaka

- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*. Padang: Andalas University Press
- Bastaman, T.K dkk. 2004. *Leksikon Istilah Kesehatan Jiwa dan Psikiatri*. Jakarta: Buku Kedokteran EGD.
- Budianta, Melani. 2014. *Eksresi untuk Identitas*. Jakarta: Suarakita.
- Budirahayu, Tuti. 2011. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Gagnon, Jhon dan Simon. 2004. *Sexual Conduct, 2nd*, Chicago: Aldine
- Hamid, Abdul. 2015. *Kaum Luth Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Islam Bina Umat.
- Kymlicka, Will. *Kewarganegaraan Multikultural . Teori Liberal mengenai Hak-Hak Minoritas*. Jakarta: LP3ES. 2003.
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia (*Pustaka Utama*).
- Koeswinarno, 2004. *Hidup sebagai Waria*. Yogyakarta : Pelangi Akasara.
- Margaret M Poloma, 2004, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masri Singarimbun, 1995. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S.
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberan. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy. J. 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadia, Z 2005. *Waria Laknat atau Kodrat*. Yogyakarta: Galang Press
- Narbuko, C. dan A. Achmadi, 1997. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Narwoko J Dwi. 2010. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Pujileksono dan Puspitosari. 2005. *Waria dan tekanan sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Ritzer, G. 2006. *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Scott, Jhon, 2011. *Sosiologi The Key Concepts*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

JURNAL

**MASYARAKAT
MARITIM**

JURNAL SOSIOLOGI
Di terbitkan oleh :
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Dompok, Tanjungpinang, Kep. Riau
Telp (0771) 7001550, Faksimile (0771) 7038999
Email : sosiologi.umrah@gmail.com

ISSN 2580-7439



9 772580 743004 >